

RENCANA KERJA TAHUN 2019



**Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bogor
2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor : 69 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019. RENJA ini merupakan penjabaran pelaksanaan dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. RENJA memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja tahun 2019. Dalam RENJA juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Penyusunan RENJA ini secara teknis berpedoman pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dan RPJMD Kabupaten Bogor.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan RENJA ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

DAFTAR ISI

Halaman:

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Peraturan Bupati Bogor Nomor : 069 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019	
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Renja Perangkat Daerah	I – 5
1.3. Maksud dan Tujuan	I – 8
1.4. Sistematika Penulisan	I – 8
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	II – 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	II – 39
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	II – 45
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II – 51
2.5. Penjelasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II – 70
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III – 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	III – 4
3.3. Program dan Kegiatan	III – 5
BAB IV : P E N U T U P	IV – 1



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah tahun 2019 dengan rencana Perangkat Daerah Tahun 2019, Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Peraturan....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);

30. Peraturan....

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 42);
37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 43);
38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 44);
39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
40. Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 46);

41. Peraturan....

41. Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 47);
42. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
43. Peraturan Bupati Bogor Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 49);
44. Peraturan Bupati Bogor Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 50);
45. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 51);
46. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 52);
47. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
48. Peraturan Bupati Bogor Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 54);
49. Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 55);
50. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 56);
51. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 57);
52. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 58);

53. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 59);
54. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 60);
55. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 61);
56. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 62);
57. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 63);
58. Peraturan Bupati Bogor Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 64);
59. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 65);
60. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 66);
61. Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 67);
62. Peraturan Bupati Bogor Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 68);
63. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69);
64. Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 70);

65. Peraturan....

65. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
66. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 69);
67. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
6. Kepala Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala PD, adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

11. Rencana....

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut RPJM Provinsi, adalah dokumen perencanaan pembangunan provinsi untuk periode lima tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut RKP Provinsi, adalah dokumen perencanaan provinsi untuk periode satu tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun.
19. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berlaku setelah ditetapkan sampai dengan akhir Desember 2017.
20. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berlaku setelah ditetapkan sampai dengan akhir Desember 2017
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA PD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Isu Strategis adalah kondisi atau hal-hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
24. Kebijakan Daerah adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

25. Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu tema atau agenda pembangunan tahunan daerah yang telah ditetapkan dan merupakan benang merah/tonggak dalam mencapai sasaran lima tahunan dalam RPJMD melalui program pembangunan daerah tahunan.
26. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang diukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
27. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

BAB II

KEDUDUKAN DAN MUATAN RENJA PD

Bagian Kesatu

Kedudukan Renja PD

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2019 merupakan dokumen rencana PD untuk periode 1 (satu) tahun, terhitung berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Renja PD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2019.
- (3) Renja PD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk:
 - a. penyusunan Renstra PD Tahun 2019-2023;
 - b. penyusunan RKA PD Tahun Anggaran 2019; dan
 - c. dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan PD.

Bagian Kedua

Muatan Renja PD

Pasal 3

Renja PD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat:

- a. tujuan dan sasaran PD;
- b. program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD; dan
- c. pendanaan dan sumber pendanaan.

BAB III....

BAB III
SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA PD

Pasal 4

- (1) Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- (2) Dokumen Renja PD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA PD.
- (3) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam RKA PD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA PD sesuai dengan Renja PD.
- (5) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA PD sesuai dengan Renja PD.

Pasal 6

Kepala PD menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Bupati melalui Kepala Badan.

Pasal 7....

Pasal 7

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD yang disampaikan oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Badan menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA PD untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
- (3) Kepala PD selanjutnya menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB V

PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 8

Renja PD Tahun 2019 dapat dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan pada RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2019.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 26 Juli 2018

BUPATI BOGOR,



NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 26 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2018 NOMOR 69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Renja, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah merupakan bagian dari perencanaan perangkat daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3). Lebih jauh dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 wajib terintegrasi dengan penyusunan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2019. Di sisi lain, dengan berakhirnya periode RPJMD Tahun 2013-2018, sementara penyusunan kedua dokumen ini dilakukan pada tahun 2018, maka proses penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2019 berada dalam masa transisi, artinya RPJMD Tahun 2019-2023 yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah belum disusun, karena belum dilakukan pemilihan, penetapan, bahkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk periode tahun 2019-2023 yang akan

menyusun RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2019-2023 berdasarkan penjabaran visi dan misi yang diusungnya. Untuk itu, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam Pasal 147 ayat (2) disebutkan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan Daerah provinsi. Dengan demikian, penyusunan Renja Perangkat Daerah diarahkan untuk menjabarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 sebagaimana juga terintegrasi dengan penyusunan substansi RKPD Tahun 2019.

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang sekaligus mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang selama ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, maka dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2019, seluruh Perangkat Daerah secara resmi mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Untuk itu, dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 ini, perlu disusun pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah agar seluruh Perangkat Daerah dapat memiliki kesamaan dalam hal substansi dan teknis penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tersebut.

Dinas Tenaga Kerja berkontribusi terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2019 untuk poin ke-5 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian”. Sedangkan fokus ke-5 pembangunan yang diemban diantaranya adalah Peningkatan Investasi dan Perluasan Lapangan Kerja.

Guna memenuhi target dari indikator-indikator yang sudah disebutkan sebelumnya dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan dinas daerah dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-

masuk dari stakeholders, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Tenaga Kerja yang Berdaya Saing dan Profesional dimaksudkan untuk memberikan pelatihan terhadap pencari kerja secara optimal agar mampu mencetak tenaga kerja siap pakai yang mampu bersaing dan profesional;
2. Transmigrasi yang Produktif dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia calon transmigrasi dan peluang usaha di lokasi transmigrasi; dan
3. Iklim Tenaga Kerja yang kondusif adalah suasana yang memungkinkan hubungan industrial yang adil dan harmonis, jaminan dan keamanan berusaha, lingkungan kerja yang aman dan sehat serta pekerja/masyarakat yang sejahtera. Iklim tenaga kerja yang kondusif dapat pula menjamin ketenangan bekerja dan berusaha sehingga dapat lebih memperluas kesempatan kerja.

Sedangkan Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur;
2. Mengurangi tingkat pengangguran melalui pelatihan kerja yang berkarakter, perluasan kesempatan kerja serta transmigrasi yang produktif; dan
3. Meningkatkan fungsi dan peran sarana hubungan industrial serta pengetahuan pekerja, pengguna dan pemberi kerja.

Secara garis besar tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan.

- a. Menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penyusun Renja PD.
- b. Orientasi mengenai Renja PD.
- c. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renja PD.

- d. Menyiapkan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Renja.

- a. Persiapan penyusunan Rancangan Renja PD.
- b. Pengolahan data dan informasi.
- c. Analisis gambaran pelayanan PD.
- d. Mereview hasil evaluasi Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD.
- e. Menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.
- f. Penelaahan rancangan awal RKPD.
- g. Perumusan tujuan dan sasaran.
- h. Penelaahan usulan masyarakat.
- i. Perumusan kegiatan prioritas.

3. Tahap Pelaksanaan Forum PD yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA.

- a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.
- b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi PD.
- c. Penyelarasan program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan Tupoksi masing-masing PD.
- d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif masing-masing PD.

4. Tahap Penetapan Renja PD.

- a. Penyempurnaan Rancangan Renja PD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.

- b. Verifikasi Rancangan Renja PD yang dapat disempurnakan oleh BAPPEDA.
- c. Pengesahan Rancangan Renja PD oleh Bupati.
- d. Penetapan Renja PD dengan Keputusan Bupati.

Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD.

RKPD memuat rencana program dan kegiatan prioritas PD, dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi PD dalam menyempurnakan Renja PD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan penyusunan Renja PD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

- Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96).

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

Maksud dan tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk memberikan panduan kepada Perangkat Daerah tentang tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2019.

Adapun tujuan penyusunan pedoman ini adalah agar:

1. Perangkat Daerah dapat menyusun Rencana Kerja tahun 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perangkat Daerah dapat mengintegrasikan perencanaan pembangunan tahunan lingkup Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Bogor;
3. Perangkat Daerah dapat mengintegrasikan rencana program/kegiatan tahun 2019 yang disusun secara teknokratik dengan perencanaan partisipatif.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
Berisi uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
Memuat Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Review terhadap Rancangan awal RKPD, Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- Bab III : Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2019
Berisi tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja PD serta program dan kegiatan.
- Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah ke-3 fokus 1 dan prioritas pembangunan ke-5 fokus 5, yaitu peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja. Kontribusi pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata indikator kinerja kunci (IKK) sebesar 82,10%, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci tersebut sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi angkatan kerja dari rencana 65.95%, terealisasi 64.07% atau 97,15%;
2. Persentase lulusan pelatihan yang memiliki sertifikasi dari rencana 13.33%, terealisasi 13.33% atau 100%;
3. Tingkat pengangguran terbuka dari rencana 7.58%, terealisasi 9,55% atau 79,37%;
4. Tenaga kerja yang ditempatkan rencana 32.24%, terealisasi 36.21% atau 112%;
5. Persentase menurunnya sengketa pengusaha-pekerja dari rencana 6.43%, terealisasi 6.97% atau 9.,27%;
6. Persentase perusahaan yang menerapkan UMK dari rencana 64.28%, terealisasi 60.15% orang atau 93.57%;
7. Persentase peserta transmigran yang ditempatkan dari rencana 33.33%, terealisasi 0 atau 0%, alasannya karena tidak mendapat kuota dari Provinsi Jawa Barat.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tahun anggaran 2017 menghasilkan rata-rata

capaian indikator kinerja output sebesar 94,71%, termasuk dalam katagori predikat tinggi. Adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp.15.184.143.377,- atau 94,71%, dari total rencana anggaran sebesar Rp.16.032.944.000,-.

Capaian kinerja dinas apabila dibandingkan RENJA dengan RENSTRA dapat dilihat pada tabel 2.1

TABEL 2.1 EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2018

SKPD : DINAS TENAGA KERJA

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1		Urusan Wajib								
1	1	Bidang Urusan Tenaga Kerja								
1	1	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran						
1	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah kebutuhan materai, perangko dan paket pengiriman					
				- meterai	845 lembar	845 lembar	0 lembar	0 lembar	0,00	0 lembar
1	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumberdaya air dan listrik					
				- Jumlah Gedung	3 Unit	4 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00	3 Unit
				- Telepon	3 jaringan	3 jaringan	3 jaringan	3 jaringan	100,00	3 jaringan
				- Air	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100,00	1 gedung
				- Listrik	5 jaringan	6 jaringan	5 jaringan	5 jaringan	100,00	5 jaringan
				- Internet	2 jaringan	3 jaringan	2 jaringan	2 jaringan	100,00	2 jaringan
1	1	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas / operasional					
				- kendaraan roda 4	10 unit	15 unit	10 unit	10 unit	100,00	9 unit
				- kendaraan roda 2	26 unit	17 unit	26 unit	26 unit	100,00	26 unit
1	1	1	4	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan kantor	13 orang	16 orang	13 orang	100,00	10 orang
				Jumlah alat kebersihan kantor dan bahan pembersih	20 Jenis barang	20 Jenis barang	20 Jenis barang	20 Jenis barang	100,00	18 Jenis barang
				Jumlah Retribusi kebersihan	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan
1	1	1	5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor untuk pelaksanaan TUPOKSI	60 jenis	60 jenis	60 jenis	100,00	62 jenis
1	1	1	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan					
				- Cetakan	27 jenis	24 jenis	27 jenis	27 jenis	100,00	16 jenis
				- Penggandaan	1458000 lembar	945000 lembar	360000 lembar	360000 lembar	100,00	360000 lembar
									1665000 lembar	114,20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)			
1	1	1	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00	3 jenis	3 jenis	100,00
1	1	1	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kebutuhan surat kabar dan majalah	4 jenis	4 jenis	0 jenis	0 jenis	0,00	0 jenis	4 jenis	100,00
1	1	1	9	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah kebutuhan pengisian tabung pemadam kebakaran dan tabung gas								
				- Tabung damkar		20 tabung	10 tabung	10 tabung	10 tabung	100,00	12 tabung	15 tabung	75,00
				- Tabung gas elpiji		4 tabung	4 tabung	4 tabung	4 tabung	100,00	2 tabung	4 tabung	100,00
				- Aqua Galon (Isi Ulang)		0 galon	0 galon	0 galon	0 galon	0,00	0 galon	0 galon	0,00
				- Premium		360 liter	360 liter	360 liter	360 liter	100,00	240 liter	360 liter	100,00
1	1	1	10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jamuan makanan dan minuman								
				- rapat		4620 orang	1980 orang	1320 orang	1320 orang	100,00	1650 orang	4950 orang	107,14
				- tamu		1200 orang	668 orang	240 orang	240 orang	100,00	300 orang	1208 orang	100,67
1	1	1	11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Jumlah rata-rapat koordinasi konsultasi ke dalam dan luar daerah	120 orang	120 orang	102 orang	102 orang	100,00	102 orang	120 orang	100,00
1	1	1	12	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah honor bulanan bagi pegawai kontrak	3 orang	3 orang	1 orang	1 orang	100,00	1 orang	3 orang	100,00
1	1	1	13	Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD	Jumlah dokumen arsip	10 Jenis	6 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100,00	2 Jenis	10 Jenis	100,00
1	1	1	14	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian	120 orang	120 orang	102 orang	102 orang	100,00	102 orang	120 orang	100,00
1	1	1	15	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Jumlah pengelolaan administrasi barang								
				- RKB		5 Buku	3 Buku	1 Buku	1 Buku	100,00	1 Buku	5 Buku	100,00
				- RPB		5 Buku	3 Buku	1 Buku	1 Buku	100,00	1 Buku	5 Buku	100,00
				- KIR		5 Buku	3 Buku	1 Buku	1 Buku	100,00	1 Buku	5 Buku	100,00
				- Lap. Inv. Barang		5 Buku	3 Buku	1 Buku	1 Buku	100,00	1 Buku	5 Buku	100,00
1	1	1	16	Penyediaan pelayanan keamanan kantor	Jumlah piket pengamanan kantor	13 orang	13 orang	13 orang	13 orang	100,00	10 orang	13 orang	100,00
1	1	2		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur								
1	1	2	1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0,00	0 unit	0 unit	100,00

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1					4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)	
1	1	2	2	Pengadaan Kendaran Dinas/Operasional	Jumlah Kendaran Dinas	15 unit	4 unit	0 unit	0 unit	0,00	0 unit	4 unit	26,67
1	1	2	3	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	434 unit	225 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0!	102 unit	327 unit	75,35
						16 jenis	16 jenis	0 jenis	0 jenis	#DIV/0!	3 Jenis	19 Jenis	118,75
1	1	2	4	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	103 unit	58 unit	13 unit	13 unit	100,00	6 unit	77 unit	74,76
						8 jenis	8 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100,00	2 Jenis	13 Jenis	162,50
1	1	2	5	Pengadaan Perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	127 unit	169 unit	5 unit	5 unit	100,00	4 unit	178 unit	140,16
						24 jenis	9 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100,00	2 Jenis	15 Jenis	62,50
1	1	2	8	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dinas, UPT-BLK dan Transito	4 Gedung	4 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	100,00	3 Gedung	3 Gedung	75,00
1	1	2	9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional di SKPD								100,00
					- Kendaraan Roda 2	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100,00	14 Unit	17 Unit	100,00
					- Kendaraan Roda 4	16 Unit	15 Unit	16 Unit	16 Unit	100,00	9 Unit	16 Unit	100,00
1	1	2	10	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor								
					- komputer	45 unit	79 unit	79 unit	79 unit	100,00	79 unit	88 unit	195,56
					- printer	21 unit	16 unit	16 unit	16 unit	100,00	16 unit	14 unit	66,67
					- Notebook	10 unit	21 unit	21 unit	21 unit	100,00	21 unit	22 unit	220,00
					- mesin tik	8 unit	8 unit	2 unit	2 unit	100,00	0 unit	5 unit	62,50
1	1	2	11	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Jumlah pemeliharaan Perlengkapan gedung Kantor di PD								
					- AC	22 unit	38 unit	38 unit	38 unit	100,00	39 unit	38 unit	172,73
					- Mesin Fax	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100,00	2 unit	2 unit	100,00
					- Telepon PABX	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	1 unit	100,00
1	1	2	12	Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor	Jumlah pemeliharaan taman/halaman kantor	3 lokasi	3 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	100,00	2 lokasi	3 lokasi	100,00
1	1	2	13	Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Listrik dan Jaringan Komunikasi	Jumlah jaringan yang dipelihara	7 titik	7 titik	7 titik	7 titik	100,00	5 titik	7 titik	100,00
1	1	2	13	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi	Jumlah jaringan yang dipelihara	1 jaringan	1 jaringan	1 jaringan	1 jaringan	100,00	1 jaringan	1 jaringan	100,00
1	1	2	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung BLK	Jumlah gedung yang terehab	2 gedung	0 gedung	0 gedung	0 gedung	0,00	0 gedung	2 gedung	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)			
1	1	2	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terehab	2 gedung	1 gedung	0 gedung	0 gedung	0,00	0 gedung	1 gedung	50,00
1	1	2	17	Rehab Gedung Balai Rehabilitasi Sosial	penyusunan DED Jumlah gedung yang direhab	1 dok 1 gedung	0 dok 1 gedung	0 dok 0 gedung	0 dok 0 gedung	0,00 0,00	0 dok 0 gedung	0 dok 1 gedung	0,00 100,00
1	1	2	18	Pembuatan Kanopi Parkir	Jumlah tempat parkir yang tersedia	0 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	0,00	0 lokasi	2 lokasi	100
1	1	2	19	Pembangunan Gedung UPT- Balai Latihan Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan (DED) Gedung yang akan Dibangun	1 Dok	1 Dok	0 Dok	0 Dok	0,00	0 dok	1 dok	100,00
1	1	2	20	Revitalisasi Gedung Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan (DED) Revitalisasi Gedung Dinas Sosial	1 Dok	1 Dok	0 Dok	0 Dok	0,00	0 dok	1 dok	100,00
1	1	3		Peningkatan Disiplin Aparatur									
1	1	3	1	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah mesin / kartu absensi	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit	0,00	0 unit	1 unit	100,00
1	1	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah sepatu aparat Jumlah pakaian pegawai	120 pasang 120 pasang	0 pasang 120 pasang	0 pasang 98 pasang	0 pasang 98 pasang	0,00 100,00	0 pasang 0 pasang	0 pasang 120 pasang	0,00 100,00
1	1	3	3	Pengadan Kartu Pengenal	Jumlah Kartu Pengenal yang dibutuhkan	1 Dinas	1 Dinas	0 Dinas	0 Dinas	0,00	1 Dinas	1 Dinas	100,00
1	1	4		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
1	1	4	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	6 orang	6 orang	0 orang	0 orang	0,00	0 orang	6 orang	100,00
1	1	4	2	Pembinaan Mental jasmani dan Rohani	Meningkatnya mental dan jasmani aparatur	1 Dinas	1 Dinas	1 Dinas	1 Dinas	100,00	1 Dinas	1 Dinas	100,00
1	1	4	3	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	120 orang	102 orang	0 orang	0 orang	0,00	0 orang	102 orang	85,00
1	1	5		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntable								
1	1	5	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP dan Laporan Tahunan - LAKIP - Laporan Tahunan - Jankin Eselon - Jankin Eselon Perubahan	50 Buku 50 Buku 20 Buku 10 Buku	30 Buku 30 Buku 0 Buku 0 Buku	10 Buku 10 Buku 10 Buku 0 Buku	10 Buku 10 Buku 10 Buku 0 Buku	100,00 100,00 100,00 #DIV/0!	10 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku	50 Buku 50 Buku 20 Buku 10 Buku	100,00 100,00 100,00 100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)			
1	1	5	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	5 dok	3 dok	1 dok	1 dok	100,00	1 dok	5 dok	100,00
1	1	5	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun	38 buku	17 buku	10 buku	10 buku	100,00	10 buku	37 buku	97,37
1	1	5	4	Penyusunan perencanaan anggaran	Jumlah Dokumen Anggaran Tahun n, Anggaran Perubahan Tahun n dan Anggaran Tahun n + 1	15 jenis dok.	10 jenis dok.	3 jenis dok.	3 jenis dok.	100,00	2 jenis dok.	15 jenis dok.	100,00
1	1	5	5	Penatausahaan keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi keuangan program/kegiatan Disnaker	60 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	60 Dokumen	100,00
1	1	5	6	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Jumlah Dokumen RENSTRA	30 buku	20 buku	10 buku	10 buku	0,00	0 buku	30 buku	100,00
					Jumlah Dokumen RENJA	100 buku	40 buku	20 buku	20 buku	100,00	20 buku	80 buku	80,00
1	1	5	7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring kegiatan	48 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	48 dokumen	100,00
1	1	5	8	Publikasi Kinerja SKPD	Tersedianya informasi kegiatan SKPD kepada masyarakat	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	4 Tahun	80,00
1	1	10		Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja									
1	1	10	1	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah peralatan pelatihan	11 paket	5 paket	0 paket	0 paket	0,00	0 paket	5 paket	45,45
1	1	10	2	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang montir motor	Terlatihnya pencari kerja yang terampil di bidang montir motor	180 orang	140 orang	20 orang	20 orang	100,00	20 orang	180 orang	100,00
1	1	10	3	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang tata rias	Terlatihnya pencari kerja yang terampil di bidang tata rias	320 orang	160 orang	0 orang	0 orang	0,00	0 orang	160 orang	50,00
1	1	10	4	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang las	Terlatihnya pencari kerja yang terampil di bidang las	220 orang	160 orang	20 orang	20 orang	100,00	40 orang	220 orang	100,00
1	1	10	5	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang menjahit	Terlatihnya pencari kerja yang terampil di bidang menjahit	180 orang	120 orang	0 orang	0 orang	0,00	0 orang	120 orang	66,67
1	1	10	6	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang mobil bensin	Terlatihnya pencari kerja yang terampil di bidang mobil bensin	120 orang	80 orang	20 orang	20 orang	100,00	20 orang	120 orang	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)			
1	1	10	7	Peningkatan profesionalisme tenaga pelatih/instruktur bagi LLS	Terlatihnya tenaga pelatih/instruktur LLS	45 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0,00	0 orang	0 orang	0,00
1	1	10	8	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang servis HP	Terlatihnya pencari kerja yang terampil di bidang service HP	180 orang	160 orang	20 orang	20 orang	100,00	20 orang	200 orang	111,11
1	1	10	9	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang instalasi listrik	Terlatihnya pencari kerja yang terampil di bidang instalasi listrik	160 orang	140 orang	0 orang	0 orang	0,00	20 orang	160 orang	100,00
1	1	10	10	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang teknik pendingin	Terlatihnya pencari kerja yang terampil di bidang teknik pendingin	180 orang	140 orang	20 orang	20 orang	0,00	20 orang	180 orang	100,00
1	1	10	11	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang teknik Dasar komputer	Terlatihnya pencari kerja yang terampil di bidang teknik dasar komputer	320 orang	160 orang	60 orang	60 orang	100,00	80 orang	300 orang	93,75
1	1	10	12	Pelatihan peningkatan manajemen produktivitas kerja bagi peserta pasca pelatihan	Terlatihnya peserta pasca pelatihan dalam meningkatkan produktivitas	120 orang	150 orang	0 orang	0 orang	0,00	0 orang	150 orang	125,00
1	1	10	13	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan di Perusahaan	Tersedianya pencari yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan	225 prsh	155 persh	0 persh	0 persh	0,00	0 persh	155 persh	68,89
1	1	10	17	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Menjahit Melalui MTU	Terlatihnya Pencari Kerja di Bidang Menjahit	200 orang	140 orang	0 orang	0 orang	0,00	20 orang	160 orang	80,00
1	1	10	18	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Las Melalui MTU	Terlatihnya Pencari Kerja di Bidang Las	260 orang	140 orang	60 orang	60 orang	100,00	40 orang	240 orang	92,31
1	1	10	19	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Otomotif Melalui MTU	Terlatihnya Pencari Kerja di Bidang Otomotif	260 orang	140 orang	40 orang	40 orang	100,00	60 orang	240 orang	92,31
1	1	10	20	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Instalasi Listrik Melalui MTU	Terlatihnya Pencari Kerja di Bidang Instalasi Listrik	240 orang	120 orang	20 orang	20 orang	100,00	0 orang	140 orang	58,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)			
1	1	10	21	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Teknik Pendingin Melalui MTU	Terlatihnya Pencari Kerja di Bidang Teknik Pendingin	160 orang	100 orang	20 orang	20 orang	100,00	0 orang	120 orang	75,00
1	1	10	22	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Tata Boga Melalui MTU	Terlatihnya Pencari Kerja di Bidang Tata Boga	220 orang	140 orang	0 orang	0 orang	0,00	0 orang	140 orang	63,64
1	1	10	23	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Elektronika melalui MTU	Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang Elektronika melalui MTU	160 orang	140 orang	0 orang	0 orang	0,00	0 orang	140 orang	0,00
1	1	10	24	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja di Bidang Bordir Komputer	Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang bordir komputer	40 orang	40 orang	0 orang	0 orang	0,00	0 orang	40 orang	100,00
1	1	10	25	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Sablon	Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang sablon	80 orang	0 orang	20 orang	20 orang	100,00	0 orang	20 orang	25,00
1	1	10	26	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Perhotelan dan Restoran	Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang Perhotelan dan Restoran	60 orang	0 orang	40 orang	40 orang	100,00	20 orang	60 orang	100,00
1	1	10	27	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Permesinan Bubut	Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang Permesinan Bubut	40 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0,00	40 orang	40 orang	100,00
1	1	10	28	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Konstruksi Beton	Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang Konstruksi Beton	20 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0,00	20 orang	20 orang	100,00
1	1	10	29	Bimtek Peningkatan Produktivitas Kerja Bagi Tenaga Kerja Perusahaan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Peningkatan Produktivitas Kerja Bagi Tenaga Kerja di Perusahaan	60 orang	0 orang	30 orang	30 orang	100,00	30 orang	60 orang	100,00
1	1	10	30	Sosialisasi Pedoman Standarisasi Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi standarisasi pelatihan berbasis kompetensi.	100 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	30 Orang	30 Orang	30,00
1	1	10	31	Bimtek Penyusunan Pedoman Standarisasi Pelatihan	Jumlah pedoman sebagai tolak ukur standar pelaksanaan pelatihan	2 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	0 Dok	1 Dok	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)			
1	1	10	32	Bimtek Metodologi Bagi Instruktur LLS di Kabupaten Bogor	Jumlah instruktur lembaga latihan swasta yang mengikuti bimbingan	60 Orang	0 Orang	30 Orang	30 Orang	100,00	30 Orang	60 Orang	100,00
1	1	10	33	Bimtek Penyusunan Kurikulum Bagi Pengelola dan Instruktur Lembaga Latihan Swasta (LLS)	Jumlah lembaga latihan swasta yang mengikuti bimbingan	30 Orang / Lembaga	0 Orang / Lembaga	0 Orang / Lembaga	0 Orang / Lembaga	0,00	30 Orang / Lembaga	30 Orang / Lembaga	100,00
1	1	10	34	Bimtek Pengukuran Produktivitas Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimbingan	55 Prshn	0 Prshn	25 Prshn	25 Prshn	100,00	30 Prshn	55 Prshn	100,00
1	1	10	35	Pelatihan Peningkatan Produktifitas Kerja Bagi Pencari Kerja Di Perusahaan	Diperoleh pencari kerja yang produktif dalam bekerja dan berusaha	140 Orang	0 Orang	60 Orang	60 Orang	100,00	105 Orang	165 Orang	117,86
1	1	10	36	Bulan Produktivitas Perusahaan di Kab. Bogor	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimbingan	65 Prshn / ukm	0 Prshn / ukm	25 Prshn / ukm	25 Prshn / ukm	100,00	40 Prshn / ukm	65 Prshn / ukm	100,00
1	1	10	37	Uji Kompetensi Bagi Peserta Pasca Pelatihan di Kab. Bogor	Tersedianya Tenaga Kerja yang bersertifikasi sesuai dengan kejuruannya	160 Orang	0 Orang	120 Orang	120 Orang	100,00	160 Orang	280 Orang	175,00
1	1	10	38	Monitoring Pasca Pelatihan di Kab. Bogor	Diperoleh data peserta pasca pelatihan	60 Desa/Kel	0 Desa/Kel	20 Desa/Kel	20 Desa/Kel	100,00	0 Desa/Kel	20 Desa/Kel	33,33
1	1	10	39	Monitoring Peserta Pasca Pemagangan di Perusahaan	Tersedianya data peserta pemagangan di perusahaan	50 Prshn	0 Prshn	25 Prshn	25 Prshn	100,00	0 Prshn	25 Prshn	50,00
1	1	10	40	Pemagangan Bagi Pencari Kerja di Kab. Bogor	Jumlah peserta pemagangan di perusahaan	30 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	30 Orang	30 Orang	100,00
1	1	10	41	Bimtek Pengembangan Wirausaha Produktif	Memahami permasalahan kewirausahaan dan mengevaluasi usahanya untuk meningkatkan produktivitas kedepan	40 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	30 Orang	30 Orang	75,00
1	1	10	42	Sosialisasi Penerapan 5S	Memahami sikap mental dan perilaku yang produktif untuk ditularkan kepada lingkungannya	80 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	0 Orang	0 Orang	0,00
1	1	10	43	Sosialisasi Uji Kompetensi Bagi Tenaga Kerja di Perusahaan	Jumlah Yang Mengikuti Sosialisasi Uji Kompetensi	50 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	30 Orang	30 Orang	60,00
1	1	10	44	Sosialisasi Uji Kompetensi Bagi Masyarakat Kabupaten Bogor	Bertambahnya Pengetahuan Uji Kompetensi Bagi Masyarakat di Kabupaten Bogor	80 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	30 Orang	30 Orang	37,50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)			
1	1	10	45	Implementasi Peraturan BNSP Bagi Direktur dan Pengurus LPK Kabupaten Bogor	Bertambahnya Pengetahuan Peraturan BNSP Bagi Direktur dan Pengurus LPK di Kabupaten Bogor	60 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	30 Orang	30 Orang	50,00
1	1	11		Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja								
1	1	11	1	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Tersedianya cakupan informasi bagi pencari kerja untuk menyerap tenaga kerja	3200 orang	2400 orang	400 orang	400 orang	100,00	400 orang	3200 orang	100,00
1	1	11	2	Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan berdasarkan Pendaftar AK1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan di perusahaan	730 orang	500 orang	130 orang	130 orang		0 orang	630 orang	86,30
1	1	11	3	Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya - rehabilitasi saluran irigasi	- Terbukanya kesempatan kerja sementara - Bertambahnya saluran irigasi	300 orang 0 m ²	69 orang 0 m ²	0 orang 0 m ²	0 orang 0 m ²	0,00 0,00	0 orang 0 m ²	69 orang 0 m ²	23,00 0,00
1	1	11	4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	Terdatanya perusahaan yg menggunakan TKA	655 orang	455 orang	80 orang	80 orang	100,00	0 orang	535 orang	81,68
1	1	11	5	Sosialisasi peraturan bagi pengguna Tenaga Kerja Asing	Terdatanya perusahaan yang menggunakan TKA	200 perush	160 perush	0 perush	0 perush	0,00	0 perush	160 perush	80,00
1	1	11	6	Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya produktifitas di bidang budidaya ikan	Jumlah kesempatan kerja di bidang budidaya ikan	213 orang	115 orang	49 orang	49 orang	100,00	0 orang	164 orang	77,00
1	1	11	7	Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya produktifitas di bidang peternakan domba	Jumlah kesempatan kerja di bidang peternakan domba	260 orang	144 orang	0 orang	0 orang	0,00	0 orang	144 orang	55,38
1	1	11	8	Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya produktifitas di bidang budidaya belut	Jumlah kesempatan kerja di bidang budidaya belut	130 orang	65 orang	0 orang	0 orang	0,00	0 orang	65 orang	50,00
1	1	11	9	Survalen ISO 9001 : 2008	Tercapainya pelayanan prima kepada pencari kerja	1 dinas	1 dinas	1 dinas	1 dinas	100,00	1 dinas	1 dinas	100,00
1	1	11	10	Bimtek bagi Pengelola LPTKS dan BKK	Tersedianya pengelola LPTKS dan BKK yang profesional	120 orang	40 orang	40 orang	40 orang	100,00	30 orang	110 orang	91,67
1	1	11	10	Pembentukan Wirausaha Baru	Meningkatnya Penyerapan Pengangguran dan Setengah Penganggur yang terdaftar.□	60 Orang	0 orang	0 orang	0 orang	#DIV/0!	60 orang	60 orang	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)			
1	1	11	11	Peningkatan Manajemen Usaha	Jumlah pelaku usaha yang ingin	90 orang	0 orang	30 orang	30 orang	100,00	0 orang	30 orang	33,33
				Bagi Usaha Pemula	berkembang								
1	1	11	11	Rakor Ketenagakerjaan	Terciptanya kesamaan pemahaman tentang	90 orang	0 orang	50 orang	50 orang	100,00	0 orang	50 orang	55,56
					ketenagakerjaan di lingkup Kabupaten Bogor.								
1	1	11	11	Monitoring Penempatan Tenaga Kerja Indonesia	Pemantauan Tenaga Kerja Indonesia yang	1 Negara	0 Negara	0 Negara	0 Negara	0,00	0 Negara	0 Negara	0,00
					bekerja di negara taiwan								
1	1	12		Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terpenuhinya hak-hak dan perlindungan tenaga kerja								
1	1	12	1	Mediasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terfasilitasinya penyelesaian perselisihan	760 kasus	675 kasus	160 kasus	176 kasus	110,00	100 kasus	951 kasus	125,13
					Hub. Industrial								
1	1	12	2	Sosialisasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan BPJS ketenagakerjaan	Tersosialisasinya prosedur pemberian	680 prsh	600 prsh	40 prsh	40 prsh	100,00	0 prsh	640 prsh	94,12
					perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan								
1	1	12	3	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak normatif pekerja	Terpantaunya penegakan norma hukum	1470 prsh	1239 prsh	0 prsh	0 prsh	#DIV/0!	0 prsh	1239 prsh	84,29
					ketenagakerjaan								
1	1	12	4	Pengkajian dan perumusan UMK/UMSK Kab. Bogor	Rekomendasi Bupati tentang	5 dok	3 dok	1 dok	1 dok	100,00	1 dok	5 dok	100,00
					UMK/UMKS								
1	1	12	5	Verifikasi dan Validasi Data SP/SB dan DPC	Teridentifikasinya jumlah serikat	280 PUK	280 PUK	50 PUK	50 PUK	100,00	280 PUK	280 PUK	100,00
					pekerja/serikat buruh								
1	1	12	6	Pelaksanaan kegiatan kerjasama tripartit daerah	- Terlaksananya sidang LKS Tripartit	15 sidang	11 sidang	2 sidang	2 sidang	100,00	2 sidang	15 sidang	100,00
					Kabupaten Bogor								
					- Tersusunnya rekomendasi kerjasama tripartit daerah (saran,pertimbangan dan pendapat)	13 rekom.	9 rekom	2 rekom	2 rekom	100,00	2 rekom	13 rekom	100,00
1	1	12	7	Pembinaan dan Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit	Terbinanya perusahaan dalam rangka	175 prsh	95 prsh	40 prsh	40 prsh	100,00	40 prsh	175 prsh	100,00
1	1	12	8	Bimbingan Teknis Mekanisme dan sistem pengupahan	Jumlah peserta yang mengikuti	3800 orang	3700 orang	50 orang	50 orang	100,00	50 orang	3800 orang	100,00
					sosialisasi tentang struktur dan skala upah serta UMK/UMSK	580 prsh	530 prsh	25 prsh	25 prsh	100,00	25 prsh	580 prsh	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)			
1	1	12	9	Pelatihan Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	Terlatihnya peserta mengenai K.3	80 orang	115 orang	0 orang	0 orang	#DIV/0!	0 orang	115 orang	143,75
1	1	12	10	Pembinaan dan pengawasan pekerja malam wanita di perusahaan	Terbina dan terawasinya pekerja malam	218 prsh	243 prsh	0 prsh	0 prsh	#DIV/0!	0 prsh	243 prsh	111,47
1	1	12	13	Kampanye Bulan K.3	Tersosialisasinya pengusaha dan pekerja mengenai K.3	120 perush.	140 perush.	0 perush.	0 perush.	#DIV/0!	0 perush.	140 perush.	116,67
1	1	12	14	Penanganan Kasus Pemogokan dan kasus ketenagakerjaan	Terfasilitasinya penyelesaian pemogokan tenaga kerja	140 kasus	90 kasus	30 kasus	30 kasus	100,00	20 kasus	140 kasus	100,00
1	1	12	15	Sosialisasi Bentuk-bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak	Tersosialisasinya dan teridentifikasinya anak yang terpaksa bekerja	400 anak	400 anak	0 anak	0 anak	0,00	0 anak	400 anak	100,00
1	1	12	16	Fasilitasi dan sertifikasi operator boiler	Terpenuhinya sertifikasi operator boiler	80 orang	80 orang	0 orang	0 orang	#DIV/0!	0 orang	80 orang	100,00
1	1	12	17	Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Operator Angkut/Angkut	Jumlah peserta Pelatihan & Fasilitasi Angkat/Angkut Sertifikasi Operator Angkut/Angkut	80 orang	80 orang	0 orang	0 orang	#DIV/0!	0 orang	80 orang	100,00
1	1	12	18	Penilaian kecelakaan kerja nihil	Terlaksananya penilaian kecelakaan kerja nihil pada perusahaan	40 prsh	0 prsh	0 prsh	0 prsh	0,00	0 prsh	0 prsh	0,00
1	1	12	19	Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan UMK di Perusahaan	Tersedianya data UMK di perusahaan	1592 prsh	792 prsh	400 prsh	200 prsh	50,00	200 prsh	1192 prsh	74,87
1	1	12	20	Bimtek Penyelesaian Perselisihan Secara Bipartit di Perusahaan (Permen No. 31 Tahun 2008)	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Penyelesaian Perselisihan Secara Bipartit di Perusahaan (Permen No. 31 Tahun 2008)	240 orang	140 orang	50 orang	50 orang	100,00	50 orang	240 orang	100,00
1	1	12	22	Bimbingan Teknis Manajemen Organisasi Serikat Pekerja	Jumlah organisasi ketenagakerjaan yang mengikuti bimtek	340 orang	240 orang	50 orang	50 orang	100,00	0 orang	290 orang	85,29
1	1	12	23	Fasilitasi Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan K3 di perusahaan	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengujian peralatan K3	98 perusahaan	0 perusahaan	0 perusahaan	0 perusahaan	0,00	0 perusahaan	0 perusahaan	0,00
1	1	12	24	Pelatihan ahli K3 Umum	Jumlah peserta pelatihan Ahli K3 Umum	50 orang	50 orang	0 orang	0 orang	#DIV/0!	0 orang	50 orang	100,00
1	1	12	25	Bimbingan Teknis Struktur dan Skala Upah Mekanisme Penangguhan UMK	tercapainya upah yang sesuai perhitungan skala dan struktur yang baku serta proses penangguhan yang sesuai dengan ketentuan.	180 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	0 orang	0 orang	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)			
1	1	12	26	Sosialisasi Permenaker No. 19 Tahun 2012 Ttg Penyerahan Sebagian Pekerjaan kepada perusahaan lain	terwujudnya pengaturan aturan kontrak kerja yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja.	180 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	0 orang	0 orang	0,00
1	1	12	26	Pembinaan dan Monitoring SP, SB dan DPC	Jumlah SP, SB dan DPC Yang Terbina dan Termonitor	340 orang	0 orang	300 orang	294 orang	0	0 orang	294 orang	86,47
1	1	12	26	Penilaian Pekerja Teladan dan Lembaga Ketenagakerjaan Terbaik	Jumlah Pekerja Teladan Jumlah PUK Terbaik Jumlah DPC Terbaik	6 orang 6 PUK 6 DPC	0 orang 0 PUK 0 DPC	3 orang 3 PUK 3 DPC	3 orang 3 PUK 3 DPC	0 0 0	3 orang 0 PUK 0 DPC	6 orang 3 PUK 3 DPC	100,00
1	1	12	27	Koordinasi TIM Tenaga Kerja Makro Kabupaten Bogor	Jumlah Roadmap dan Rekomendasi Tenaga Kerja Makro di Kabupaten Bogor	1 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	0	0 Dok	1 Dok	100,00
2				Urusan Pilihan									
2	1			Bidang Urusan Transmigrasi									
2	1	1		Transmigrasi Regional	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui program transmigrasi								
2	1	1	1	Penyuluhan Transmigrasi Regional	Jumlah peserta sosialisasi mengenai transmigrasi regional	40 kec	40 Kec	15 Kec	15 Kec	100,00	0 Kec	55 Kec	137,50
2	1	1	2	Penempatan Transmigrasi Regional	Jumlah peserta transmigrasi yang ditempatkan	52 KK	37 KK	15 KK	0 KK	0,00	3 KK	40 KK	76,92
2	1	1	3	Penjajagan calon lokasi penempatan transmigrasi dan pembuatan naskah kerja sama antar daerah	Jumlah lokasi penjajagan calon lokasi penempatan transmigrasi dan Pembuatan Naskah Kerjasama Antar Daerah	15 lokasi 13 Dok	11 lokasi 9 Dok	2 lokasi 2 Dok	2 lokasi 2 Dok	100,00 100,00	2 lokasi 2 Dok	15 lokasi 13 Dok	100,00 100,00
2	1	1	4	Monitoring dan Evaluasi perkembangan transmigrasi di lokasi penempatan	Jumlah lokasi monitoring, evaluasi dan pelaporan	7 Lokasi	5 lok	1 lok	1 lok	100,00	1 lok	7 lok	100,00
2	1	1	5	Pelatihan bagi Calon Transmigrasi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi calon transmigran yang siap diberangkatkan	30 KK	0 KK	0 KK	0 KK	0,00	0 KK	0 KK	0,00

Sedangkan pada tahun anggaran 2018, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah yang keempat, yaitu peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja. Kontribusi pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata indikator kinerja kunci (IKK) sebesar 92,23%, dengan predikat kinerja tinggi. Hasil capaian kinerja pada tahun 2017 tersebut dijadikan sebagai data dasar perencanaan jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2017, prediksi capaian kinerja tahun 2018 yang sedang berjalan dan pencapaian Renstra PD periode Tahun 2013-2018 maka evaluasi dan analisis masing-masing kegiatan/program dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

a. Program Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 73,55% termasuk kategori tinggi karena tidak terserapnya anggaran untuk biaya makanan dan minuman untuk menjamu rapat dan tamu secara keseluruhan.
- 2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar negeri, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 85% termasuk kategori tinggi karena tidak terserapnya anggaran untuk biaya Rakor dan Konsultasi secara keseluruhan.
- 3) Kegiatan penyediaan pelayanan Administrasi Kepegawaian, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 85% termasuk kategori tinggi karena tidak terserapnya

anggaran untuk biaya pelayanan administrasi kepegawaian secara keseluruhan.

- 4) Kegiatan penyediaan pelayanan Administrasi Barang, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 80% termasuk kategori tinggi karena tidak terserapnya anggaran untuk biaya pelayanan administrasi barang secara keseluruhan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 26,67%, karena tidak tercapainya target pengadaan kendaraan dinas secara keseluruhan.
- 2) Kegiatan pengadaan mabeuleur, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 74,88% termasuk kategori tinggi karena tidak tercapainya target pengadaan mabeuleur secara keseluruhan.
- 3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 68,93% termasuk kategori tinggi karena tidak tersedianya peralatan kantor sesuai dengan target sebanyak 71 unit dan 3 jenis secara keseluruhan.
- 4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 75% termasuk kategori tinggi karena tidak tercapainya jumlah gedung yang terpelihara sesuai dengan target 3 gedung secara keseluruhan.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 85%, termasuk kategori tinggi karena tidak tercapainya target pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 102 orang secara keseluruhan.

d. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 45,45%, termasuk kategori tinggi karena tidak tercapainya target peralatan pelatihan sebanyak 5 paket secara keseluruhan.

e. Program Transmigrasi Regional

Kegiatan Penempatan Transmigrasi Regional, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 40%, termasuk kategori tinggi karena tidak tercapainya target pemberangkatan transmigran dari 30 KK hanya direalisasikan 12 KK.

2. Realisasi Program / Kegiatan yang memenuhi target hasil / keluaran yang direncanakan yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, jumlah kebutuhan materai sebanyak 845 lembar melebihi dari target.

2) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % termasuk kategori sangat tinggi karena dapat tersedianya fasilitas

sumber daya komunikasi, air, listrik dan tambah daya yang meliputi: 3 line telepon, 1 rekening sumber daya air, 5 rekening listrik, 2 jaringan internet sesuai dengan target.

- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah perizinan kendaraan dinas yang telah terselesaikan untuk kendaraan roda 4 sejumlah 10 unit, sedangkan kendaraan roda 2 sebanyak 26 unit sesuai dengan target.
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan kantor telah terealisasi sebanyak 12 orang dari target sebanyak 13 orang, jumlah alat kebersihan kantor dan bahan pembersih telah terealisasi sebanyak 20 jenis barang dari target sebanyak 20 jenis barang dan jumlah retribusi kebersihan telah terealisasi selama 60 bulan dari target selama 60 bulan.
- 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % termasuk kategori sangat tinggi karena terlaksananya penyediaan 60 jenis alat tulis kantor sesuai dengan target.
- 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, termasuk kategori sangat tinggi dengan realisasi cetakan sebanyak 27 jenis dari target 27 jenis dan realisasi

penggandaan sebanyak 1.305.000. lembar dari target pengadaan sebanyak 1.458.000. lembar.

- 7) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, termasuk kategori sangat tinggi karena penyediaan komponen instalasi listrik telah dilaksanakan sebanyak 3 jenis sesuai dengan target.
- 8) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah kebutuhan surat kabar dan majalah sebanyak 4 jenis sesuai dengan target.
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori tinggi dengan realisasi tabung damkar 15 tb, tabung gas elpiji 4 tb dan Premium 360 ltr sesuai dengan target.
- 10) Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Adminisrasi/ Teknis Perkantoran, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah tenaga pendukung yang telah tersedia sebanyak 3 orang sesuai dengan target.
- 11) Kegiatan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip PD, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat tinggi karena terpenuhinya administrasi perkantoran dengan jumlah 2 jenis dokumen dan arsip yang didata sesuai dengan target.
- 12) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan

capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat tinggi karena realisasi jumlah piket pengaman kantor berjumlah 13 orang di 3 lokasi sesuai dengan target.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan kantor, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 137,01% termasuk kategori sangat tinggi karena tersedianya pengadaan perlengkapan kantor melebihi target sebanyak 174 unit.
- 2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah kendaraan roda dua yang terpelihara sebanyak 17 unit, sedangkan kendaraan roda empat sebanyak 16 unit sesuai dengan target.
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 36,68% termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pemeliharaan komputer sebanyak 215 unit, printer sebanyak 36 unit, notebook sebanyak 51 unit dan mesin tik sebanyak 15 unit melebihi target.
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Bekala Perlengkapan Gedung Kantor, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 124,24% termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pemeliharaan AC sebanyak 38 unit, mesin fax 2 unit dan telepon PABX sebanyak 1 unit sesuai dengan jumlah target yang ditetapkan.
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor, dari target sampai dengan akhir tahun 2017

menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah taman halaman kantor yang terpelihara mencapai 3 lokasi, sesuai dengan targetnya.

- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik dan Jaringan Komunikasi, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat baik karena jaringan yang terpelihara berjumlah 7 titik, sesuai dengan target.
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik dan Jaringan Komputerisasi, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat baik karena jaringan yang terpelihara berjumlah 1 jaringan, sesuai dengan target.
- 8) Rehabilitasi sedang/berat Gedung UPT Balai Latihan Kerja, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat baik karena terlaksananya rehabilitasi 1 gedung sesuai dengan target.
- 9) Rehabilitasi Gedung Dinsos, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat baik karena terlaksananya rehabilitasi 1 gedung sesuai dengan target.
- 10) Pembangunan Gedung UPT Balai Latihan Kerja, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat baik karena terlaksananya dokumen perencanaan (DED) gedung yang akan dibangun 1 dokumen sesuai dengan target.
- 11) Revitalisasi Gedung Dinsos, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar

100% termasuk kategori sangat baik karena terlaksananya revitalisasi 1 gedung sesuai dengan target.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- 1) Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat tinggi karena terlaksananya pengadaan mesin/kartu absensi 1 unit sesuai dengan target.
- 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat tinggi karena terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian 120 Stel sesuai target.
- 3) Kegiatan Pengadaan kartu pengenalan, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat tinggi karena terlaksananya pengadaan kartu pengenalan 1 dinas sesuai dengan target.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- 1) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan, dari target sampai dengan akhir tahun 2016 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat baik karena jumlah aparatur yang mengikuti bimtek sebanyak 6 orang sesuai dengan target.
- 2) Kegiatan Pembinaan Mental Jasmani dan Rohani, dari target sampai dengan akhir tahun 2011 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat

tinggi karena pelaksanaan olahraga dan pengajian berjumlah 1 dinas sesuai dengan target.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat tinggi karena dokumen LAKIP dan laporan tahunan telah tersedia masing-masing sebanyak 40 buku sesuai dengan target.
- 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat tinggi karena tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran sebanyak 4 dokumen sesuai dengan target.
- 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat tinggi karena tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun sebanyak 26 buku sesuai dengan target.
- 4) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Anggaran, dari target sampai dengan akhir tahun 2016 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat tinggi karena tersedianya dokumen anggaran tahun n sebanyak 12 jenis dokumen, anggaran perubahan tahun n sebanyak 12 jenis dokumen dan anggaran tahun n+1 sebanyak 12 dokumen sesuai target.
- 5) Kegiatan Penatausahaan Keuangan PD, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat tinggi

karena tersedianya dokumen pengelolaan administrasi keuangan program/kegiatan untuk 48 dokumen administrasi keuangan sesuai dengan target.

- 6) Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja PD, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat tinggi karena tersedianya dokumen RENJA tahun n+1 sebanyak 30 buku dan dokumen RENJA Perubahan sebanyak 30 buku sesuai dengan target.
- 7) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat tinggi karena terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan beserta dokumen laporan sebanyak 36 dokumen sesuai dengan target.
- 8) Kegiatan Publikasi Kinerja PD, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat tinggi karena telah tersedianya informasi kegiatan PD kepada masyarakat selama 3 tahun sesuai dengan target.

f. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja di Bidang Montir Motor, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 88,89%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah Pencari kerja yang terlatih berjumlah 160 orang, sesuai dengan target.
- 2) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja di Bidang Tata Rias, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 50%, termasuk kategori sangat tinggi karena

jumlah pencari kerja yang terlatih berjumlah 160 orang, sesuai target.

- 3) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Las, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 81,82%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pencari kerja yang terlatih di bidang las berjumlah 180 orang sesuai dengan target.
- 4) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja di Bidang Menjahit, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 66,67%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pencari kerja yang terlatih di bidang menjahit sebanyak 120 orang sesuai target.
- 5) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja di Bidang Mobil Bensin, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 83,33%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pencari kerja yang terlatih di bidang menjahit sebanyak 100 orang sesuai target.
- 6) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja di bidang Service HP, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pencari kerja yang terlatih di bidang servis hp berjumlah 180 orang sesuai dengan target.
- 7) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di bidang Instalasi Listrik, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 87,50%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pencari kerja yang terlatih di bidang instalasi listrik berjumlah 140 orang sesuai dengan target.

- 8) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di Bidang Teknik Pendingin, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 77,78%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pencari kerja yang terlatih di bidang Teknik Pendingin berjumlah 140 orang sesuai dengan target.
- 9) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di Bidang Teknik Dasar Komputer, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 68,75%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pencari kerja yang terlatih berjumlah 220 orang sesuai dengan target.
- 10) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Manajemen Produktivitas Kerja bagi Peserta Pasca Pelatihan, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 125%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pencari kerja yang terlatih berjumlah 10 orang melebihi target.
- 11) Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan di Perusahaan, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 77,78%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah perusahaan yang teridentifikasi kebutuhan pelatihannya berjumlah 175 perusahaan sesuai dengan target.
- 12) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di Bidang Menjahit Melalui MTU, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 70%, termasuk kategori sangat tinggi karena pencari kerja yang terlatih di bidang menjahit melalui MTU berjumlah 140 orang sesuai target.

- 13) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di Bidang Las Melalui MTU, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 76,92%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pencari kerja yang terlatih di bidang las melalui MTU berjumlah 200 orang sesuai dengan target.
- 14) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di Bidang Otomotif Melalui MTU, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 69,23%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pencari kerja yang terlatih di bidang otomotif melalui MTU berjumlah 180 orang, sesuai dengan target.
- 15) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di Bidang Instalasi Listrik Melalui MTU, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 58,33%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pencari kerja yang terlatih di bidang instalasi listrik melalui MTU berjumlah 140 orang sesuai dengan target.
- 16) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di Bidang Teknik Pendingin Melalui MTU, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 75%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pencari kerja yang terlatih di bidang teknik pendingin melalui MTU berjumlah 120 orang sesuai dengan target.
- 17) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di Bidang Tata Boga Melalui MTU, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 63,64%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pencari kerja yang terlatih

di bidang tata boga melalui MTU berjumlah 140 orang, sesuai dengan target.

- 18) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di Bidang Elektronika Melalui MTU, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 87,50%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pencari kerja yang terlatih di bidang elektronika melalui MTU berjumlah 140 orang, sesuai dengan target.
- 19) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di Bidang Bordir Komputer, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pencari kerja yang terlatih di bidang Bordir Komputer berjumlah 40 orang, sesuai dengan target.
- 20) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di Bidang Sablon, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 25%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pencari kerja yang terlatih di bidang Sablon berjumlah 20 orang, sesuai dengan target.
- 21) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di Bidang Perhotelan dan Restoran, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 66,67%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pencari kerja yang terlatih di bidang Sablon berjumlah 40 orang, sesuai dengan target.
- 22) Kegiatan Bimtek Peningkatan Prouktivitas Kerja bagi Tenaga Kerja Perusahaan, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 50%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah

peserta yang mengikuti Bimtek Peningkatan Prouktivitas Kerja bagi Tenaga Kerja Perusahaan berjumlah 30 orang, sesuai dengan target.

- 23) Kegiatan Bimtek Penyusunan Pedoman Standarisasi Pelatihan, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 50%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pedoman sebagai tolok ukur standar pelaksanaan pelatihan berjumlah 1 dokumen, sesuai dengan target.
- 24) Kegiatan Bimtek Metodologi bagi Instruktur LLS di Kab Bogor, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 50%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah Instruktur lembaga latihan swasta yang mengikuti bimbingan berjumlah 30 orang, sesuai dengan target.
- 25) Kegiatan Bimtek Pengukuran Produktivitas Kerja di Perusahaan, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 45,45%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah Perusahaan yang mengikuti bimbingan berjumlah 25 perusahaan, sesuai dengan target.
- 26) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktivitas Kerja bagi Pencari Kerja Perusahaan, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 42,86%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pencari yang produktif dalam bekerja dan berusaha berjumlah 60 orang, sesuai dengan target.
- 27) Kegiatan Bulan Produktivitas Perusahaan di Kabupaten Bogor, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 38,46%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah perusahaan yang mengikuti bimbingan berjumlah 25 perusahaan, sesuai dengan target.

- 28) Kegiatan Uji Kompetensi bagi Peserta Pasca Pelatihan di Kabupaten Bogor, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 75%, termasuk kategori sangat tinggi karena tersedia tenaga kerja yang bersertifikasi sesuai dengan kejuruannya berjumlah 120 orang, sesuai dengan target.
- 29) Kegiatan Monitoring Pasca Pelatihan di Kabupaten Bogor, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 33,33%, termasuk kategori sangat tinggi karena diperoleh data peserta pasc pelatihan berjumlah 20 desa/kel, sesuai dengan target.
- 30) Kegiatan Monitoring Peserta Pasca Pemagangan di Perusahaan, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 50%, termasuk kategori sangat tinggi karena tersedianya data peserta pemagangan di perusahaan berjumlah 25 orang, sesuai dengan target.

g. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

- 1) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 87,50%, termasuk kategori sangat tinggi karena tersedianya informasi bagi 2800 orang pencari kerja sesuai dengan target.
- 2) Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan Berdasarkan Pendaftar AK I, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 52,05%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pencari kerja yang diberikan kesempatan kerja berjumlah sebanyak 380 orang sesuai dengan target.

- 3) Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Sistem Padat Karya rehabilitasi saluran Irigasi, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 23%, termasuk kategori sangat tinggi karena terbukanya kesempatan kerja sebanyak 69 Orang sesuai dengan target.
- 4) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 81,68%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah perusahaan yang terdata menggunakan TKA sesuai dengan target, yaitu berjumlah 535 Perusahaan.
- 5) Kegiatan Sosialisasi perturan bagi pengguna Tenaga Kerja Asing, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 80%, termasuk kategori sangat tinggi karena terdatanya perusahaan yang menggunakan TKA berjumlah 160 Perusahaan.
- 6) Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Sistem Padat Karya Produktivitas di Bidang Budidaya Ikan, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 77%, termasuk kategori sangat tinggi karena pemberian kerja sementara kepada penganggur dan setengah penganggur sebanyak 164 Orang sesuai dengan target.
- 7) Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Sistem Padat Karya Produktivitas di Bidang Peternakan Domba, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 55,38%, termasuk kategori sangat tinggi karena pemberian kerja sementara kepada penganggur dan setengah penganggur sebanyak 144 Orang sesuai dengan target.

- 8) Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Sistem Padat Karya Produktivitas di Bidang Budidaya Belut, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 50%, termasuk kategori sangat tinggi karena pemberian kerja sementara kepada penganggur dan setengah penganggur sebanyak 65 Orang sesuai dengan target.
- 9) Kegiatan Survalen ISO 9001:2008, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat tinggi karena terlaksananya survalen ISO 9001:2008 untuk tercapainya pelayanan prima kepada pencari kerja, sesuai dengan target.
- 10) Kegiatan Bimbingan Teknik bagi Pengelola LPTKS dan BKK dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 66,67%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah pencari kerja yang diberikan Bimbingan Teknik berjumlah sebanyak 80 orang sesuai dengan target.

h. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

- 1) Kegiatan Mediasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 109,87%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah kasus yang difasilitasi telah berjumlah melebihi target, yaitu 835 kasus.
- 2) Kegiatan Sosialisasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 94,12%, termasuk kategori sangat tinggi karena telah

tersialisasinya prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 640 perusahaan sesuai dengan target.

- 3) Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Hukum dan BPJS Ketenagakerjaan, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 84,29%, termasuk kategori sangat tinggi karena terpantaunya penegakan norma hukum ketenagakerjaan kepada 1239 perusahaan sesuai dengan target.
- 4) Kegiatan Pengkajian dan Perumusan UMK/UMSK Kab. Bogor, dari target sampai dengan akhir tahun 2016 menunjukkan capaian kinerja sebesar 800%, termasuk kategori sangat tinggi karena pengkajian dan perumusan UMK/UMKS menghasilkan 1 dokumen rekomendasi Bupati tentang UMK/UMKS sesuai dengan target.
- 5) Kegiatan Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 200%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang teridentifikasi berjumlah 560 PUK, melebihi target.
- 6) Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Tripartit Daerah, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, termasuk kategori sangat tinggi karena telah terlaksananya sidang LKS Tripartit Kabupaten Bogor sebanyak 14 kali sidang serta tersusunnya rekomendasi kerjasama tripartit daerah sebanyak 11 rekomendasi sesuai dengan target.
- 7) Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 77,14% termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah

perusahaan yang terbina sesuai dengan target, yaitu 135 perusahaan.

- 8) Kegiatan Bimbingan Teknis Mekanisme dan Sistem Pengupahan, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah peserta yang mengiktui sosialisasi tentang struktur dan skala upah serta UMK/UMKS berjumlah 3750 orang dari 555 perusahaan sesuai dengan target.
- 9) Kegiatan Pelatihan Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 143,75%, termasuk kategori sangat tinggi karena terlatihnya peserta mengenai K3 sebanyak 115 orang melebihi target.
- 10) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pekerja Malam Wanita di Perusahaan, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 111,47%, termasuk kategori sangat tinggi karena telah terbina dan terawasinya pekerja malam wanita pada 243 perusahaan sesuai dengan target.
- 11) Kegiatan Kampanye Bulan K3, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 116,67%, termasuk kategori sangat tinggi karena telah tersosialisasinya pengusaha dan pekerja mengenai K3 pada 140 perusahaan sesuai dengan target.
- 12) Kegiatan Penanganan Kasus Pemogokan dan Kasus Ketenagakerjaan, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 85,71%, termasuk kategori sangat tinggi karena pemogokan tenaga kerja yang terfasilitasi berjumlah 120 kasus sesuai dengan targetnya.

- 13) Kegiatan Sosialisasi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, termasuk kategori sangat tinggi karena telah terlaksananya sosialisasi kepada orang tua anak dan pihak pengusaha yang mempekerjakan anak dibawah umur sebanyak 400 orang anak sesuai dengan target.
- 14) Kegiatan Fasilitasi dan Operator (Boiler), dari target sampai dengan akhir tahun 2016 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, termasuk kategori sangat tinggi karena telah tersertifikasinya operator boiler sebanyak 80 orang sesuai dengan target.
- 15) Kegiatan Pelatihan Sertifikasi Operator Angkat/Angkut, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, termasuk kategori sangat tinggi karena telah tersertifikasinya operator angkat/angkut sebanyak 80 orang sesuai dengan target.
- 16) Kegiatan Monitoring Pelaksanaan UMK di Perusahaan, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 74,87%, termasuk kategori sangat tinggi karena telah tersedianya data UMK pada 1192 perusahaan, sesuai dengan target.
- 17) Kegiatan Bimtek Penyelesaian Perselisihan Secara Bipartit di Perusahaan (Permen No. 31 Tahun 2009), dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 79,17%, termasuk kategori sangat tinggi karena jumlah peserta yan mengikuti bimtek penyelesaian perselisihan secara bipartit di perusahaan berjumlah 190 orang, sesuai dengan target.

- 18) Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Organisasi Serikat Pekerja, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 85,29%, termasuk kategori sangat tinggi karena telah terlaksananya bimbingan teknis bagi organisasi ketenagakerjaan sesuai dengan target, yaitu 290 orang.
- 19) Kegiatan Pelatihan Ahli K.3 Umum, dari target sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, termasuk kategori sangat tinggi karena tersertifikasinya ahli K3 umum pada 50 orang sesuai dengan target.

i. Program Transmigrasi Regional.

- 1) Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Regional, dari target sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, termasuk kategori sangat tinggi karena sosialisasi mengenai transmigrasi regional telah dilakukan pada 16 kecamatan sesuai dengan target.
- 2) Kegiatan Penjajagan Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi dan Pembuatan Naskah Kerja Sama Antar Daerah, dari target sampai dengan akhir tahun 2016 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, termasuk kategori sangat tinggi karena calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dijajagi berjumlah 5 lokasi dan naskah kerjasama antar daerah yang telah tersedia sebanyak 3 dokumen.
- 3) Kegiatan monitoring dan Evaluasi Perkembangan Transmigrasi di Lokasi, dari target sampai dengan akhir tahun 2016 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, termasuk kategori sangat tinggi karena lokasi transmigrasi yang telah monitoring berjumlah 3 lokasi.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tidak ada kegiatan yang melebihi target tahun 2017

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tidak ada kegiatan yang melebihi target tahun 2017

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tidak ada kegiatan yang melebihi target tahun 2017

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tidak ada kegiatan yang melebihi target tahun 2017

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tidak ada kegiatan yang melebihi target tahun 2017

f. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas kerja

Tidak ada kegiatan yang melebihi target tahun 2017

g. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Tidak ada kegiatan yang melebihi target tahun 2017

h. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Tidak ada kegiatan yang melebihi target tahun 2017

i. Program Transmigrasi Regional

Tidak ada kegiatan yang melebihi target tahun 2017

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu:

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan yaitu:

- 1) Adanya pengurangan penganggaran kegiatan dari TAPD dikarenakan defisitnya anggaran APBD; dan
- 2) Tidak dilaksanakannya kegiatan yang telah dianggarkan akibat dari adanya hambatan dari sisi teknis maupun non teknis.

b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas;
- 2) Penganggaran kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Dinas;
- 3) Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan mengakomodir seluruh target yang ditetapkan.

c. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu:

- 1) Realisasi kinerja melebihi target Rencana Kinerja Dinas;
- 2) Realisasi kinerja melebihi dikarenakan banyaknya usulan kegiatan dari hasil musrenbang kecamatan.

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas, yaitu:

- 1) Apabila target kinerja dalam Renstra tidak tercapai akan mengakibatkan rendahnya realisasi kinerja dinas sesuai program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan;
- 2) Apabila target kinerja dalam renstra tercapai mengakibatkan baiknya realisasi kinerja dinas sesuai program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan; dan
- 3) Apabila target kinerja dalam renstra melebihi mengakibatkan sangat tingginya realisasi kinerja dinas sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, yaitu:

- 1) Pada tahun berikutnya perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perlu ditingkatkan dan mengusulkan anggaran pembantuan dari APBN dan APBD I; dan
- 2) Mengakomodir usulan-usulan yang datang hasil Musrenbang Kecamatan, Forum OPD, Musrenbang Kabupaten dan juga hasil Reses DPRD agar kegiatan yang direncanakan lebih tepat sasaran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan dinas berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam IKK adalah sebagai berikut :

1. Angka partisipasi angkatan kerja;
2. Tingkat partisipasi angkatan kerja;
3. Rasio penduduk yang bekerja;
4. Rasio lulusan S1/S2/S3;
5. Rasio ketergantungan;
6. Tingkat pengangguran terbuka;
7. Jumlah pencari kerja yang terampil;
8. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun;
9. Pencari kerja yang ditempatkan;
10. Keselamatan perlindungan;
11. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah;
12. Terwujudnya sistem pengupahan yang memadai;
13. Fasilitasi lembaga kerjasama tripartit;

14. Sertifikasi tenaga operator di perusahaan;
15. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program padat karya;
16. Transmigran swakarsa;
17. Transmigran regional; dan
18. Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB.

Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan IKK ada beberapa indikator yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal yaitu :

1. Tingkat partisipasi angkatan kerja; dan
2. Transmigrasi Swakarsa.

Analisis kinerja pelayanan terhadap IKK yaitu :

1. Tingkat partisipasi angkatan kerja dalam formula penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun)}} = \text{Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja}$$

Sementara di Dinas Tenaga Kerja belum pernah mengadakan pendataan mengenai jumlah penduduk angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja (15-64 Thn) sehingga dinas tidak dapat menentukan tolak ukur dan indikator kinerja yang akan dicapai dengan maksimal (pendataan dilakukan oleh BPS).

Indikator kegiatan yang dapat menunjang IKK tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu :

- a. Jumlah kesempatan kerja sistem padat karya saluran irigasi dengan target Renstra yaitu 300 orang;
- b. Jumlah peserta perluasan kesempatan kerja sistem padat karya produktivitas budidaya ikan, dengan target Renstra yaitu 213 orang;
- c. Jumlah peserta perluasan kesempatan kerja sistem padat karya produktivitas budidaya domba, dengan target Renstra yaitu 260 orang; dan

- d. Jumlah peserta perluasan kesempatan kerja sistim padat karya produktivitas budidaya belut, dengan target Renstra yaitu 130 orang.
2. Pencari kerja yang ditempatkan, tolak ukur dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah cakupan informasi bagi Pencari kerja untuk menyerap tenaga kerja dengan target Renstra yaitu 3200 orang; dan
 - b. Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi untuk bekerja di perusahaan berdasarkan pendaftar AK1, dengan target Renstra yaitu 730 orang.

Kegiatan penempatan tenaga kerja lebih besar ditunjang dari kegiatan rutin dikarenakan adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaporkan pengumuman lowongan kerja sehingga penempatan tenaga kerja akan lebih besar dari target kegiatan yang telah dianggarkan APBD.

3. Transmigrasi swakarsa, dinas tidak dapat menentukan tolak ukur dan indikator kinerja yang akan dicapai dikarenakan dinas hanya melaksanakan kegiatan Transmigrasi Regional.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dapat dilihat di Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD/Kecamatan Kabupaten Bogor

SKPD : Dinas Tenaga Kerja
Tahun 2018 Kabupaten Bogor

No	Indikator	Katagori (Penciri Ter maju, SPM, Permendagri, Mulok)	Target Akhir Renstra (2018)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Ketenagakerjaan										
1	Angka partisipasi angkatan kerja	Permendagri 54 Tahun 2010	66%	65,90%	65,95%	66,00%	65,85%	65,85%	66,00%	66,05%	
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Permendagri 54 Tahun 2010	66%	65,90%	65,95%	66,00%	65,85%	65,85%	66,00%	66,05%	
3	Tingkat pengangguran terbuka	Permendagri 54 Tahun 2010	7,41%	7,80%	7,58%	7,41%	8,26%	8,26%	7,41%	7,35%	
4	Rasio lulusan S1/S2/S3	Permendagri 54 Tahun 2010	227,54	212,86	220,2	227,54	198,18	198,18	227,54	235	
5	Rasio ketergantungan	Permendagri 54 Tahun 2010	45,78%	48,78%	47,28%	45,78%	51,78%	51,78%	48,78%	44,28%	
6	Jumlah pencari kerja yang terampil	Permendagri 54 Tahun 2010	3120 orang	880 orang	400 orang	440 orang	900 orang	900 orang	440 orang	500 orang	
7	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Permendagri 54 Tahun 2010	840 kasus	170 kasus	160 kasus	160 kasus	230 kasus	230 kasus	160 kasus	160 kasus	
8	Keselamatan dan perlindungan	Permendagri 54 Tahun 2010									
	- Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan		85 orang	30 orang	0	0	40 orang	0	0	0	
	- Pemberian perlindungan hukum dan BPJS Ketenagakerjaan		600 perusahaan	200 perusahaan	0	0	200 perusahaan	0	0	0	
	- Perlindungan pekerja anak		400 orang	200 orang	0	0	0	0	0	0	
	- Perlindungan pekerja malam wanita		218 perusahaan	60 perusahaan	0	0	75 perusahaan	0	0	0	
	- Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak normatif pekerja		2226 perusahaan	742 perusahaan	0	0	495 perusahaan	0	0	0	
9	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Permendagri 54 Tahun 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Terwujudnya sistem pengupahan yang memadai	Permendagri 54 Tahun 2010	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
11	Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit	Permendagri 54 Tahun 2010	13 rekomendasi	3 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	3 rekomendasi	3 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	
12	Sertifikasi tenaga operator di perusahaan	Permendagri 54 Tahun 2010	160 orang	60 orang	0	0	50 orang	50 orang	0	0	

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD/Kecamatan Kabupaten Bogor

SKPD : Dinas Tenaga Kerja
Tahun 2018 Kabupaten Bogor

No	Indikator	Katagori (Penciri Termaju, SPM, Permendagri, Mulok)	Target Akhir Renstra (2018)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Ketenagakerjaan										
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Permendagri 54 Tahun 2010	66,00%	65,95%	66,00%		64,07%	62,71%	66,05%		
2	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki Sertifikasi	Permendagri 86 Tahun 2017	17,78%	13,33%	17,78%		13,33%	17,78%	22,23%		
3	Persentase tenaga kerja magang dalam negeri	Permenaker Nomor 14 Tahun 2015	10,00%	-	10,00%		-	18,78%	13,00%		
4	Tingkat pengangguran terbuka	Permendagri 54 Tahun 2010	7,41%	7,58%	7,41%		9,55%	9,08%	7,35%		
5	Tenaga kerja yang ditempatkan	Permendagri 86 Tahun 2017	33,45%	32,24%	33,45%		36,21%	39,35%	34,66%		
6	Persentase menurunnya sengketa pengusaha-pekerja	Permendagri 86 Tahun 2017	6,09%	6,43%	6,09%		6,97%	6,19%	5,75%		
7	Persentase perusahaan yang menerapkan UMK	Permenaker Nomor 12 Tahun 2017	66,98	64,28%	66,98%		60,15%	35,52%	69,68%		
1	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kualitasnya	Mulok				180 Orang			180 Orang	220 Orang	
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Permendagri 86 Tahun 2017				43,14%			43,14%	45,50%	
3	Besaran tenaga kerja yang lulus uji kompetensi	Mulok				92,86%			92,86%	93,75%	
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Permendagri 86 Tahun 2017				11,94%			11,94%	12,38%	
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Permendagri 86 Tahun 2017				40,00%			40,00%	41,18%	
6	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Permendagri 86 Tahun 2017				54,13%			54,13%	50,74%	
7	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Permendagri 86 Tahun 2017				35,00%			35,00%	35,33%	
	Urusan Transmigrasi										
1	Laju pengiriman transmigrasi regional	Mulok	1	0	3	100	0	3	100	100	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

1. Sejauh mana Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas dan Hal Kritis yang Terkait Dengan Pelayanan Dinas

Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan kinerja birokrasi bisa memperbaiki iklim ekonomi yang amat diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi berkepanjangan. Kinerja birokrasi pelayanan publik di Indonesia yang sering disoroti masyarakat menjadi faktor penentu yang penting dari penurunan minat investasi. Dalam kehidupan politik, perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik berimplikasi luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kurang baiknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Perbaikan kinerja pelayanan publik diharapkan mampu memperbaiki kembali citra pemerintah di mata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan yang membaik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali sehingga pemerintah bisa meningkatkan legitimasi yang lebih kuat di mata publik. Pelayanan yang dilakukan pemerintah dalam berbagai jenis layanan masih dianggap belum sesuai harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai pengaduan maupun keluhan, baik yang disampaikan langsung kepada institusi unit pelayanan maupun melalui media cetak atau elektronika. Di sisi lain, masyarakat sendiripun belum memberi kontrol yang efektif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik. Karenanya, untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, upaya-upaya peningkatan pelayanan publik terus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana dan akuntabilitas. Acuan pelaksanaan pelayanan publik harus berlandaskan pada pelayanan prima dengan prinsip lebih baik (better), lebih cepat

(faster), lebih murah (cheaper), lebih sederhana (more simple dan aktual (newer)).

Perlunya SPM dimaksudkan untuk :

- a. Memberi pedoman kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan dasar khususnya di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. Menciptakan kesatuan langkah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang tenaga kerja, ketenagakerjaan dan transmigrasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. Memberikan perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum kepada masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah spesifikasi teknis atau patokan pelayanan secara minimal yang dapat digunakan sebagai acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan dan sumber daya manusia, dan sarana prasarana.

Beberapa pelayanan yang harus dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, yaitu :

- a. Pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. Pelayanan dasar yang wajib diberikan berupa pelaksanaan pelatihan kerja;
- b. Penempatan tenaga kerja. Pelayanan dasar yang wajib diberikan berupa :
 - 1) Pelayanan Informasi Pasar Kerja;
 - 2) Penempatan Tenaga Kerja di dalam Negeri; dan
 - 3) Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
- c. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pelayanan dasar yang wajib berupa :

- 1) Pembinaan kelembagaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja; dan
 - 2) Pemerantaraan/mediasi perselisihan hubungan industrial.
- d. Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Pelayanan dasar yang wajib berupa :
- 1) Pengawasan norma ketenagakerjaan;
 - 2) Pengawasan Norma kerja perempuan dan anak; dan
 - 3) Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Urusan Transmigrasi.

- a. Pemberian Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigran.
- b. Pembinaan/Pelatihan calon transmigran sesuai dengan tingkat kompetensi yang dibutuhkan/dikembangkan.

Pada akhirnya, dengan adanya SPM bidang dapat menjadi acuan untuk mengukur kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah. Artinya, SPM itu juga merupakan ukuran untuk melihat kinerja dinas.

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas

Pada dasarnya Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja merupakan implementasi dari Tupoksi dan kewenangan yang ada dengan mensinergikan pada Kebijakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bogor melalui capaian Visi dan Misi. Semua tujuan dan sasaran serta indikator kinerja program dan kegiatan diarahkan untuk merealisasikan tujuan pembangunan masyarakat Kabupaten Bogor secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, tidak hanya dapat dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja saja tetapi perlu dukungan PD lain.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terealisasinya tujuan dan sasaran kegiatan yang dilaksanakan. Dinamika masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan lingkungan kerja yang ada menuntut percepatan dalam penyelesaian masalah yang cepat. Apabila faktor pengaruh dan permasalahan, baik internal maupun eksternal tidak teratasi akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun Faktor pengaruh sekaligus permasalahan tersebut, adalah :

a. Keterbatasan SDM;

Kondisi ini terjadi disebabkan kurangnya SDM yang ada di dinas dan kurangnya perputaran pegawai yang seharusnya dapat menjadi penyegaran dan pengalaman. Secara kuantitas juga, masih kurang memadai sehingga percepatan penyelesaian pekerjaan tertunda dari target waktu sehingga pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dapat terganggu.

b. Alokasi anggaran;

Komposisi dan struktur anggaran yang diusulkan seringkali tidak dapat terealisasi seluruhnya. Hal ini membawa konsekuensi perlunya revisi terhadap program dan kegiatan yang sudah diusulkan. Optimalisasi menjadi berkurang, disebabkan alokasi anggaran yang terbatas. Akibatnya program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang ada menjadi kurang optimal dalam mencapai indikator kinerja yang diharapkan.

c. Sarana dan prasarana.

Kenyamanan kerja dan peningkatan kinerja sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan dan kelancaran program/kegiatan. Kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan juga

tergantung adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat menunjang secara langsung. Seringkali kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kondisi pada akhirnya dapat tidak tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan. Kekurangan perlengkapan kantor seperti sarana mobilitas.

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Provinsi dan Nasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)

Renja merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang menjadi acuan bagi setiap dinas untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam bentuk rumusan kebijakan, penetapan program/kegiatan, sasaran, indikator dan target terukur serta penyediaan sumber pembiayaannya.

Selanjutnya, pelaksanaan Renja harus sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang merupakan kebijakan pembangunan daerah. Dengan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah maka secara otomatis capaian program Provinsi dan Nasional akan tercapai dikarenakan RPJMD Kabupaten Bogor mengacu kepada RPJMD

Provinsi dan Nasional, sehingga dengan tercapainya pembangunan dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat di daerah secara khusus dan nasional secara umum.

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas

Tantangan dalam peningkatan pelayanan dinas adalah :

- a. Masih tingginya angka pengangguran;
- b. Masih banyaknya kasus perselisihan hubungan Industrial;
- c. Masih tingginya jumlah kecelakaan kerja; dan
- d. Keterampilan Pencari kerja masih rendah.

Peluang dalam peningkatan pelayanan dinas adalah :

- a. Banyaknya jumlah perusahaan;
- b. Banyaknya organisasi ketenagakerjaan;
- c. Letak kabupaten Bogor yang sangat strategis; dan
- d. Masih banyaknya potensi daerah lain untuk menyerap tenaga kerja melalui transmigrasi.

5. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya sering kali menghadapi beberapa isu dan permasalahan yang dapat mengurangi optimalisasi dalam melaksanakan tugas fungsi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Masih tingginya tingkat pengangguran disebabkan masih terbatasnya lapangan pekerjaan, keahlian tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja yang terdaftar;
- b. Ada peningkatan jumlah kasus hubungan industri dari rencana 160 kasus yang diselesaikan 176 kasus; dan
- c. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dipadukan sertifikat bertaraf Internasional bagi para pencari kerja agar dapat bersaing dan berlaku di kawasan ASEAN.

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut, Dinas Tenaga Kerja merencanakan untuk mengadakan program dan kegiatan guna menjawab atau memberikan solusi yang diantaranya adalah:

- a. Pada tahun berikutnya dalam penanganan pengangguran volumenya perlu ditingkatkan dan mengusulkan anggaran pembantuan dari APBN dan APBD I;

- b. Sosialisasi terhadap aturan-aturan ketenagakerjaan perlu diintensifkan dan melibatkan semua pihak, khususnya serikat pekerja dan pihak pengusaha; dan
- c. Peningkatan jumlah tenaga kerja terlatih dan tersertifikasi sesuai kompetensinya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan Antara Rancangan Awal RKPD Dengan Hasil Analisis Kebutuhan

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.3. dan tabel 2.4.

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 Kabupaten Bogor

SKPD : DINAS TENAGA KERJA												
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Urusan Wajib					Urusan Wajib						
	Ketenagakerjaan					Ketenagakerjaan						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.076.072.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					2.054.540.000	
			Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran						Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Disnaker	Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumberdaya air	- Telephone 3 line - Air 1 line - Listrik 5 line - Internet 2 line	266.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumberdaya air	- Telephone 2 line - Air 1 line - Listrik 4 line - Internet 2 line	240.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kantor Disnaker	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	- Kendaraan Roda empat 9 Unit - Kendaraan roda	23.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	- Roda 4: 9 Unit - Roda 2: 26 Unit	19.400.000	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor Disnaker	- Jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan - Jumlah alat kebersihan kantor dan bahan pembersih	11 Orang 17 Jenis	288.536.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Non Penciri	Kantor Disnaker	- Jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan - Jumlah alat kebersihan kantor dan bahan pembersih	10 Orang 17 Jenis	246.050.000	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Disnaker	Jumlah kebutuhan ATK untuk pelaksanaan Tupoksi	60 jenis	177.528.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah kebutuhan ATK untuk pelaksanaan Tupoksi	66 jenis	193.871.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Disnaker	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Cetakan 27 jenis dan 360.000 lembar	138.131.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Cetakan 14 jenis dan 360.000 lembar	122.730.000	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Disnaker	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 jenis	35.690.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 jenis	28.625.000	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Disnaker	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	3 jenis	40.355.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	5 jenis	54.410.000	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kantor Disnaker	Jumlah jamuan makan dan minuman :	- Rapat 1320 orang - Tamu 240 orang	71.650.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah jamuan makan dan minuman :	- Rapat 1320 orang - Tamu 300 orang	58.050.000	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Kantor Disnaker	Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan	380 DD 220 LD	582.468.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan	324 DD 251 LD	577.895.000	
10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kantor Disnaker	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	1 orang	24.295.000	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Non Penciri	Kantor Disnaker	Tersedianya honor bulanan bagi pegawai kontrak daerah	1 orang	50.108.000	
11	Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen arsip pengelolaan administrasi dokumentasi dan arsip	2 jenis	11.818.000	Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen arsip pengelolaan administrasi dokumentasi dan arsip	2 jenis dokumen	14.943.000	
12	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian	16 Dokumen	158.760.000	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian	16 Dokumen	189.820.000	
13	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Kantor Disnaker	Jumlah pengelolaan administrasi barang :	- RKBU 1 buku - RPBU 1 buku - KIR 1 buku - Lap Inventaris Barang 1 buku	4.841.000	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah pengelolaan administrasi barang :	- RKBU 1 buku - RPBU 1 buku - KIR 1 buku - Lap Inventaris Barang 1 buku	6.938.000	
14	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Kantor Disnaker	Jumlah piket keamanan kantor	12 Orang 3 Gedung	251.700.000	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah piket keamanan kantor	10 orang	251.700.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				889.152.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					771.050.000	
1	Pengadaan Mebeleur	Kantor Disnaker	Jumlah Mebeleur yang dibutuhkan	1 jenis	53.500.000							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Pengadaan Peralatan Kantor	Kantor Disnaker	Jumlah pengadaan peralatan kantor	2 jenis	96.525.000							
3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kantor Disnaker	Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan	2 jenis	49.350.000							
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kantor Disnaker	Jumlah gedung kantor dinas, UPT BLK, BKS dan Transito yang terpelihara	3 Gedung	197.775.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah gedung kantor dinas, UPT BLK, BKS dan Transito yang terpelihara	3 gedung	197.775.000	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Disnaker	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara :	- Roda 4 7 unit - Roda 2 12 unit	96.250.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara :	- Roda 4 9 unit - Roda 2 14 unit	122.650.000	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Disnaker	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3 jenis	35.750.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 jenis 42 Unit	44.525.000	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kantor Disnaker	Jumlah peralatan Gedung kantor yang terpelihara	4 jenis	81.250.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah peralatan Gedung kantor yang terpelihara	3 jenis	79.750.000	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor	Kantor Disnaker	Jumlah taman halaman kantor yang terpelihara	2 lokasi	106.177.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah taman halaman kantor yang terpelihara	2 lokasi	199.325.000	
9	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komunikasi	Kantor Disnaker	Jumlah jaringan listrik dan komunikasi yang terpelihara	2 Jaringan	91.425.000	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komunikasi	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah jaringan listrik dan komunikasi yang terpelihara	2 Jaringan	66.150.000	
10	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi	Kantor Disnaker	Jumlah jaringan komputerisasi yang terpelihara	1 jaringan	81.150.000	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah jaringan komputerisasi yang terpelihara	1 jaringan	60.875.000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				99.600.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					-	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kantor Disnaker	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	98 x 2 stel	99.600.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	98 x 2 stel	-	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				64.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					46.250.000	
1	Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	Kantor Disnaker	Jumlah bimbingan mental jasmani dan rohani	48 kali	64.000.000	Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah bimbingan mental jasmani dan rohani	33 kali	46.250.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				368.110.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					657.818.000	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen : LAKIP Lap. Tahunan Jankin Eselon Jankin Eselon Perubahan	10 buku 10 buku 10 buku 10 buku	12.569.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen : LAKIP Lap. Tahunan Jankin Eselon Jankin Eselon Perubahan	10 buku 10 buku 10 buku 10 buku	16.407.000	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1 dok	3.875.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1 dok	4.466.000	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	10 buku	5.411.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	10 buku	5.736.000	
4	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen perencanaan anggaran tahun 2018 dan anggaran perubahan tahun 2018	2 dok	48.424.000	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen perencanaan anggaran tahun 2018 dan anggaran perubahan tahun 2018	3 dok	107.205.000	
5	Penatausahaan Keuangan SKPD	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan SKPD	12 dok	65.423.000	Penatausahaan Keuangan SKPD	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan SKPD	12 dok	121.540.000	
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja bulanan dan triwulanan	12 dok	108.911.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja bulanan dan triwulanan	12 dok	162.824.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Publikasi kinerja SKPD	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen informasi kegiatan SKPD kepada masyarakat	10 media	100.000.000	Publikasi kinerja SKPD	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen informasi kegiatan SKPD kepada masyarakat	16 kali tayang	100.000.000	
8	Penyusunan Renja SKPD	Kantor Disnaker	Jumlah Dokumen Renja yang disusun	20 buku	9.497.000	Penyusunan Renja SKPD	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah Dokumen Renja yang disusun	20 buku	9.934.000	
9	Penyusunan Renstra SKPD	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen Renstra	10 buku	14.000.000	Penyusunan Renstra SKPD	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen Renstra	10 buku	129.706.000	
					-	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja					1.032.783.000	
1						Uji Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Di Kabupaten Bogor	Non Penciri	Kab. Bogor	Tersedianya Tenaga Kerja Kompeten yang memiliki Sertifikasi Profesi	360 orang	1.032.783.000	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				7.470.126.000	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					2.953.379.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Montir Motor	Kantor UPT-BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang montir motor	60 orang	238.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Montir Motor	Non Penciri	Kantor UPT-BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang montir motor	20 orang	90.313.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Las	Kantor UPT-BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang las	60 orang	264.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Las	Non Penciri	Kantor UPT-BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang las	20 orang	103.894.000	
3	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Mobil Bensin	UPT BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang mobil bensin	60 orang	213.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Mobil Bensin	Non Penciri	Kantor UPT-BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang mobil bensin	20 orang	99.080.000	Musrenbang Kecamatan
4	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Service HP	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang service hp	60 orang	238.000.000							
5	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Instalasi Listrik	Kantor UPT-BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang listrik	60 orang	211.500.000							
6	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Teknik Pendingin	Kantor UPT-BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang teknik pendingin	60 orang	232.400.000	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Teknik Pendingin	Non Penciri	Kantor UPT-BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang teknik pendingin	20 orang	106.100.000	
7	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Teknik Dasar Komputer	Kantor UPT-BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang teknik dasar komputer	100 orang	248.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Teknik Dasar Komputer	Non Penciri	Kantor UPT-BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang teknik dasar komputer	80 orang	296.454.000	Musrenbang Kecamatan, Teknokratik
8	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Menjahit Melalui MTU	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang menjahit melalui MTU	60 orang 3 Kecamatan	214.300.000	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Menjahit Melalui MTU	Non Penciri	1 Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang menjahit melalui MTU	20 Orang	78.543.000	Musrenbang Kecamatan
9	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Las Melalui MTU	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang las	60 orang 3 Kecamatan	293.400.000	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Las Melalui MTU	Non Penciri	2 Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang las	40 orang	209.132.000	Musrenbang Kecamatan
10	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Otomotif Melalui MTU	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang otomotif	60 orang 3 Kecamatan	309.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Otomotif Melalui MTU	Non Penciri	2 Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang otomotif	40 orang	168.292.000	Musrenbang Kecamatan
11	Pendidikan dan Ketreampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Konstruksi Beton	Kantor UPT-BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang konstruksi beton	60 orang	292.600.000	Pendidikan dan Ketreampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Konstruksi Beton	Non Penciri	Kantor UPT-BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang konstruksi beton	20 Orang	107.300.000	Teknokratik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Perhotelan dan restaurant	Kantor UPT-BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Perhotelan	60 orang	284.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Perhotelan dan restaurant	Non Penciri	Kantor UPT-BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Perhotelan	20 Orang	108.889.000	Musrenbang Kecamatan
13	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Permesinan Bubut	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang Permesinan Bubut	60 orang	296.300.000	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Permesinan Bubut	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang Permesinan Bubut	60 Orang	308.830.000	Teknokratik
14	Bimtek Peningkatan Produktivitas Kerja Bagi Tenaga Kerja di Perusahaan	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Peningkatan Produktivitas Kerja Bagi Tenaga Kerja di Perusahaan	60 orang	115.400.000							
15	Sosialisasi Pedoman Standarisasi Pelatihan Berbasis Kompetensi	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Pedoman Standarisasi Pelatihan Berbasis Kompetensi	60 orang	99.808.000							
16	Bimtek Metodologi Bagi Instruktur LLS di Kab. Bogor	Kab. Bogor	Jumlah instruktur lembaga latihan swasta yang mengikuti bimbingan	60 Orang / lembaga	182.300.000							
17	Sosialisasi Kurikulum Bagi Pengelola dan Instruktur Lembaga Latihan Swasta (LLS)	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	60 Orang / lembaga	168.230.000	Sosialisasi Kurikulum Bagi Pengelola dan Instruktur Lembaga Latihan Swasta (LLS)	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	120 Orang	99.867.000	Teknokratik
18	Bimtek Pengukuran Produktivitas Kerja di Perusahaan	Kab. Bogor	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimbingan	60 Perusahaan	148.300.000	Pelatihan Pengukuran Produktivitas Kerja di Perusahaan	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah perusahaan yang mengikuti pelatihan	30 Perusahaan	56.237.000	Teknokratik
19	Pelatihan Peningkatan Produktifitas Kerja Bagi Pencari Kerja Di Perusahaan	Kab. Bogor	Diperoleh pencari kerja yang produktif dalam bekerja dan berusaha	60 orang	167.300.000							
20	Bulan Produktivitas Perusahaan di Kab. Bogor	Kab. Bogor	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi mengenai produktifitas di perusahaan	6 UKM terbaik	86.000.000							
21	Uji Kompetensi Bagi Tenaga Kerja / Pencari Kerja di Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Tersedianya Tenaga Kerja yang bersertifikasi sesuai dengan kejuruannya	400 Orang	2.640.000.000	Bulan Produktivitas Perusahaan di Kab. Bogor	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi mengenai produktifitas di perusahaan	40 Perusahaan	104.927.000	Teknokratik
22	Pemagangan Bagi Pencari Kerja di Kab. Bogor	Kab. Bogor	Memahami Permenaker 36/2016 dan menciptakan pencaker kompeten bagi dunia kerja.	40 Orang	59.588.000	Pemagangan Bagi Pencari Kerja di Kab. Bogor	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah tenaga kerja yang dimagangkan	60 Orang	178.026.000	Musrenbang Kecamatan
23	Sosialisasi Uji Kompetensi Bagi Masyarakat Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Masyarakat memahami manfaat uji kompetensi.	80 Orang	138.000.000							
24	Implementasi Peraturan BNSP Bagi Direktur dan Pengurus LPK Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Bertambahnya Pengetahuan Peraturan BNSP Bagi Direktur dan Pengurus LPK di Kabupaten Bogor.	40 Orang	208.300.000							
25	Bimtek Pengembangan Wirausaha Produktif	Kab. Bogor	Tersedianya pencari kerja yang produktif dan kompeten	40 Orang	121.400.000							
26						Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Teknik Pendingin melalui MTU	Non Penciri	1 Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang teknik pendingin	20 orang	86.716.000	Musrenbang Kecamatan
27						Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Instalasi Listrik melalui MTU	Non Penciri	1 Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang listrik	20 orang	74.696.000	Musrenbang Kecamatan
28						Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Menjahit	Non Penciri	Kantor UPT-BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang menjahit	20 Orang	92.962.000	Teknokratik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29						Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Sablon melalui MTU	Non Penciri	1 Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang sablon melalui MTU	20 Orang	99.418.000	Musrenbang Kecamatan
31						Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Bogor	Non Penciri	Kab. Bogor	Prosentase Produktivitas Tenaga Kerja di Kab. Bogor dalam 1 (satu) Tahun	1 Dokumen	129.100.000	Teknokratik
32						Pelatihan Peningkatan Produktivitas Bagi Tenaga Kerja dan Wirausaha	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Produktivitas Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Wirausaha	90 Orang	161.366.000	Musrenbang Kecamatan
33						Pembangunan Sistem informasi Kebutuhan Pelatihan dan Pemagangan di Perusahaan	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah aplikasi sistem informasi yang dibangun	1 Aplikasi	127.347.000	Teknokratik
34						Sosialisasi Pemagangan Bagi Masyarakat di kabupaten Bogor	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pemagangan	200 Orang	65.890.000	Teknokratik
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				1.183.722.000	Program Peningkatan Kesempatan Kerja					3.473.150.000	
1	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Kab. Bogor	Jumlah pencari kerja yang memperoleh informasi tentang penyerapan tenaga kerja di perusahaan	400 orang	225.463.000	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah pencari kerja yang memperoleh informasi tentang penyerapan tenaga kerja di perusahaan	400 orang	851.182.000	
2	Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan berdasarkan Pendaftar AK1	Kantor Disnaker	Jumlah pencari kerja yang memperoleh informasi tentang penyerapan tenaga kerja di perusahaan	100 orang	99.623.000	Pengelolaan Calon Tenaga Kerja Berdasarkan Pendaftar AK1	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah pencari kerja yang memperoleh informasi tentang penyerapan tenaga kerja di perusahaan	50 orang	49.465.000	
3	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan bagi Perusahaan Pengguna TKA	Kab. Bogor	Tersedianya data TKA pada perusahaan di wilayah Kabupaten Bogor sebagai bahan evaluasi selanjutnya.	80 Perusahaan	77.133.000							
4	Perluasan Kesempatan kerja sistim padat karya produktivitas di bidang budidaya domba	Kab. Bogor	Terbukanya wirausaha baru bagi tenaga kerja di bidang budidaya domba.	40 orang	198.000.000							
5	Survalen ISO 9001:2008	Kantor Disnaker	Tersedianya sertifikasi ISO untuk pelayanan AK I	1 Jenis Pelayanan	185.581.000	Survalen ISO 9001:2015	Non Penciri	Kantor Disnaker	Tersedianya sertifikasi ISO untuk pelayanan AK I	1 Jenis Pelayanan	179.342.000	
6	Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Bursa Kerja Khusus (BKK)	Kab. Bogor	Pengelola LPTKS dan BKK mampu mengaplikasikan hasil pelatihan dan bimtek pada lembaga tempat mereka bernaung.	40 orang	109.422.000							
7	Pembentukan Wirausaha Baru	Kab. Bogor	Terbentuknya wirausaha baru bagi masyarakat pedesaan.	60 orang	288.500.000	Pembentukan Wirausaha Baru	Non Penciri	Kec. Rancabungur Kec.Tenjo Kec.Tenjolaya	Jumlah tenaga kerja pengangguran dan setengah penganggur yang terserap	28 Kelompok / 560 Orang	1.939.533.000	Reses Dewan
8						Pelatihan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan perusahaan pengguna TKA, BKK dan LPTKS	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah perusahaan pengguna TKA, Pengelola LPTKS dan BKK yang terlatih	40 Orang 60 Perusahaan	186.416.000	
9						Sosialisasi Prosedur Informasi Pasar Kerja Melalui AKL, AKAD dan AKAN	Non Penciri	Kab. Bogor	Tersosialisasinya informasi kesempatan kerja ke luar negeri kepada pencari kerja	150 Orang	91.891.000	
10						Pelatihan Manajemen Kewirausahaan bagi Usaha Pemula dan Kelompok Usaha	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah Pelaku Usaha yang ingin berkembang	100 Orang	144.887.000	
11						Monitoring dan Evaluasi Perluasan Kerja	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi perluasan kerja	1 Dokumen	30.434.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				2.312.409.000	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					1.255.673.000	
1	Mediasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kab. Bogor	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang terfasilitasi	160 kasus	103.200.000	Mediasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang terfasilitasi	160 kasus	84.502.000	
2	Pengkajian dan Perumusan UMK/UMSK Kabupaten Bogor	Kab. Bogor	Tercapainya kesepakatan Dewan Pengupahan dalam merekomendasikan besaran UMK/UMSK Kabupaten Bogor kepada Bupati	1 dok	188.300.000	Pengkajian dan Perumusan UMK/UMSK Kabupaten Bogor	Non Penciri	Kab. Bogor	Tercapainya kesepakatan Dewan Pengupahan dalam merekomendasikan besaran UMK/UMSK Kabupaten Bogor kepada Bupati	1 dok	326.387.000	
3	Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Tripartit Daerah	Kab. Bogor	- Jumlah pelaksanaan sidang LKS Tripartit Daerah - Jumlah rekomendasi Kerja Sama Tripartit Daerah (saran, pertimbangan dan pendapat) yang tersusun	2 Kali 3 Rekomendasi	115.300.000	Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Tripartit Daerah	Non Penciri	Kab. Bogor	- Jumlah pelaksanaan sidang LKS Tripartit Daerah - Jumlah rekomendasi Kerja Sama Tripartit Daerah (saran, pertimbangan dan pendapat) yang tersusun	2 Kali 3 Rekomendasi	127.622.000	
4	Pelaksanaan MayDay	Kab. Bogor	Kondusifnya iklim ketenagakerjaan melalui hubungan industrial yang dinamis, harmonis dan berkeadilan di perusahaan.	1 Kegiatan MayDay	143.500.000	Pelaksanaan MayDay	Non Penciri	Kab. Bogor	Kondusifnya iklim ketenagakerjaan melalui hubungan industrial yang dinamis, harmonis dan berkeadilan di perusahaan.	1 Kegiatan MayDay	126.145.000	
5	Pembinaan dan Pembentukan lembaga kerjasama (LKS) Bipartit	Kab. Bogor	Jumlah pembinaan perusahaan dalam rangka pembentukan LKS Bipartit di perusahaan	40 perusahaan	32.300.000	Pembinaan dan Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan sosialisasi pembentukan LKS Bipartit	40 perusahaan	84.663.000	
6	Bimbingan Teknis Mekanisme dan Sistem Pengupahan	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek tentang struktur dan skala upah serta UMK/UMSK	50 Orang 25 Perusahaan	88.400.000	Pelatihan Mekanisme dan Sistem Pengupahan	Non Penciri	Kecamatan Megamendung	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang struktur dan skala upah serta UMK/UMSK	50 Orang 25 Perusahaan	77.214.000	
7	Penanganan Kasus Pemogokan dan Kasus Ketenagakerjaan	Kab. Bogor	Jumlah kasus pemogokan yang difasilitasi penanganannya	25 Kasus	64.300.000	Penanganan Kasus Pemogokan dan Kasus Ketenagakerjaan	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah kasus pemogokan yang difasilitasi penanganannya	20 kasus	44.830.000	
8	Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan UMK di Perusahaan	Kab. Bogor	Terpantaunya perusahaan yang melaksanakan pengupahan sesuai UMK/UMSK.	200 perusahaan	1.142.000.000							
9	Bimtek Penyelesaian Perselisihan Secara Bipartit di Perusahaan (Permen No. 31 Tahun 2009)	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Penyelesaian Perselisihan secara Bipartit di Perusahaan	50 orang	91.300.000	Pelatihan Penyelesaian Perselisihan Secara Bipartit di Perusahaan (Permen No. 31 Tahun 2008)	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Penyelesaian Perselisihan secara Bipartit di	50 orang	85.633.000	
10	Sosialisasi Manajemen Organisasi Serikat Pekerja	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Manajemen Organisasi Serikat Pekerja	50 orang	98.844.000							
11	Pembinaan dan Monitoring SP, SB dan DPC	Kab. Bogor	Terbinanya SP, SB dan DPC di Kabupaten Bogor	30 PUK 10 DPC	66.385.000							
12	Penilaian Pekerja Teladan dan Lembaga Ketenagakerjaan Terbaik	Kab. Bogor	Jumlah Pekerja Teladan Jumlah PUK Terbaik Jumlah DPC Terbaik	3 orang 3 PUK 3 DPC	89.240.000	Penilaian Pekerja Teladan dan Lembaga Ketenagakerjaan Terbaik	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah Pekerja Teladan Jumlah PUK Terbaik Jumlah DPC Terbaik	3 orang 3 PUK 3 DPC	59.204.000	
13	Verifikasi dan Validasi Data SP/SB dan DPC	Kab. Bogor	Tervalidasinya data jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan dan DPC SP/SB di wilayah Kabupaten Bogor.	1 Dokumen	89.340.000	Verifikasi dan Validasi Data SP/SB dan DPC	Non Penciri	Kantor Disnaker	- Jumlah data SP/SB dan DPC yang divalidasi - Jumlah Sistem Aplikasi data verifikasi SP/SB	1 Dokumen	73.296.000	
14						Review Perencanaan Tenaga Kerja Makro	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen review perencanaan tenaga kerja makro	1 Dokumen	70.848.000	
15						Pembinaan dan Monitoring PP, PKB, dan PKWT	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah Dokumen PP, PKB dan PKWT yang dimonitoring	1 Dokumen	95.329.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Program Transmigrasi Regional					211.559.000	Program Transmigrasi Regional					209.947.000	
1	Penyuluhan Transmigrasi Regional	25 kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan tentang transmigrasi regional	15 Kec	36.400.000	Penyuluhan Transmigrasi Regional	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan tentang transmigrasi regional	15 Kec	16.238.000		
2	Penempatan Transmigrasi Regional	Sumatera Selatan dan Kalimantan	Jumlah transmigran yang ditempatkan di lokasi penerima	15 KK	149.982.000	Penempatan Transmigrasi Regional	Non Penciri	Gorontalo	Jumlah transmigran yang ditempatkan di lokasi penerima	10 KK	119.020.000		
3	Penjajagan Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi dan Pembuatan Naskah Kerjasama Antar Daerah	Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara	Jumlah lokasi penempatan transmigrasi yang dilakukan penjajagan	2 Lokasi	13.904.000	Penjajagan Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi dan Pembuatan Naskah Kerjasama Antar Daerah	Non Penciri	Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara	Jumlah lokasi penempatan transmigrasi yang dilakukan penjajagan	2 Lokasi	2.362.000		
4	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Transmigrasi di Lokasi Penempatan	Kalimantan Barat, Gorontalo	Jumlah lokasi penempatan transmigrasi yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangannya	2 lokasi	11.273.000	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Transmigrasi di Lokasi	Non Penciri	Kalimantan Barat	Jumlah lokasi penempatan transmigrasi yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangannya	1 lokasi	2.092.000		
5						Pelatihan Untuk Peserta Calon Transmigrasi	Non Penciri	Kab. Bogor	Terbinanya dan terlatihnya calon transmigran yg siap diberangkatkan	20 Orang	70.235.000		

**Tabel 2.4 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2019
Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Bogor**

SKPD : DINAS TENAGA KERJA

No	Program/Kegiatan	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan	Sumber Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program pelayanan administrasi perkantoran					2.054.540.000			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Non Penciri	Kantor Disnaker	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	4 Rekening	240.000.000	APBD II		Teknokratik
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Non Penciri	Kantor Disnaker	1. Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/operasional 2. Jumlah Penggantian STNK Kendaraan Dinas/Operasional	26 Unit (Roda dua) 9 Unit (Roda empat)	19.400.000	APBD II		Teknokratik
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Non Penciri	Kantor Disnaker	- Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai - Jumlah alat kebersihan kantor yang dibutuhkan	10 Orang 17 Jenis 3 gedung	246.050.000	APBD II		Teknokratik
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	66 Jenis 1 Sekretariat 3 Bidang 1 UPT	193.871.000	APBD II		Teknokratik
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	14 Jenis 360.000 lembar	122.730.000	APBD II		Teknokratik
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	2 Jenis 1 Sekretariat 3 Bidang 1 UPT	28.625.000	APBD II		Teknokratik
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	5 Jenis 1 Sekretariat 3 Bidang 1 UPT	54.410.000	APBD II		Teknokratik

No	Program/Kegiatan	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan	Sumber Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah orang yang diberikan jamuan makanan dan minuman	1320 Orang	58.050.000	APBD II		Teknokratik
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	324 Perjalanan (DD) 251 Perjalanan (LD)	577.895.000	APBD II		Teknokratik
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	1 Orang	50.108.000	APBD II		Teknokratik
	Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen arsip pengelolaan administrasi dokumentasi dan arsip	2 Jenis	14.943.000	APBD II		Teknokratik
	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	16 Dokumen	189.820.000	APBD II		Teknokratik
	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen administrasi barang	4 Dokumen	6.938.000	APBD II		Teknokratik
	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah petugas keamanan kantor	10 Orang 3 Gedung	251.700.000	APBD II		Teknokratik
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur					771.050.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah gedung kantor dinas, UPT BLK, dan Transito yang terpelihara	3 Gedung	197.775.000	APBD II		Teknokratik
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	23 Unit	122.650.000	APBD II		Teknokratik

No	Program/Kegiatan	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan	Sumber Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 Jenis 42 Unit	44.525.000	APBD II		Teknokratik
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	4 jenis Jenis 119 unit Unit	79.750.000	APBD II		Teknokratik
	Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah taman halaman kantor yang terpelihara	2 Lokasi	199.325.000	APBD II		Teknokratik
	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komunikasi	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah jaringan listrik dan komunikasi yang terpelihara	2 Jaringan	66.150.000	APBD II		Teknokratik
	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah jaringan komputerisasi yang terpelihara	1 Jaringan	60.875.000	APBD II		Teknokratik
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur					46.250.000			
	Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah bimbingan mental jasmani dan rohani	33 kali	46.250.000	APBD II		Teknokratik
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					657.818.000			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan kantor	4 Dokumen 40 Buku	16.407.000	APBD II		Teknokratik
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	4.466.000	APBD II		Teknokratik
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Kantor Disnaker	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	10 Buku	5.736.000	APBD II		Teknokratik

No	Program/Kegiatan	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan	Sumber Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan perencanaan anggaran	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dan jenis dokumen perencanaan anggaran	2 130 Dokumen buku	107.205.000	APBD II		Teknokratik
	Penatausahaan Keuangan SKPD	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan	12 Dokumen	121.540.000	APBD II		Teknokratik
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan	12 Dokumen	162.824.000	APBD II		Teknokratik
	Publikasi kinerja SKPD	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen informasi kegiatan SKPD kepada masyarakat	16 kali tayang	100.000.000	APBD II		Teknokratik
	Penyusunan Renja SKPD	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen Renja SKPD	2 20 Dokumen Buku	9.934.000	APBD II		Teknokratik
	Penyusunan Renstra SKPD	Non Penciri	Kantor Disnaker	Jumlah dokumen Renstra	1 10 Dokumen Buku	129.706.000	APBD II		Teknokratik
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja					1.032.783.000			
	Uji Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Di Kabupaten Bogor	Non Penciri	Kab. Bogor	Tersedianya Tenaga Kerja Kompeten yang memiliki Sertifikasi Profesi	280 Orang	1.032.783.000	APBD II		Teknokratik
	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja					2.953.379.000			
	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Bidang Montir Motor	Non Penciri	BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang montir motor	20 Orang	90.313.000	APBD II		Teknokratik

No	Program/Kegiatan	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan	Sumber Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Bidang Las	Non Penciri	BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang las	20 Orang	103.894.000	APBD II		Teknokratik
	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Bidang Mobil Bensin	Non Penciri	BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Mobil Bensin	20 Orang	99.080.000	APBD II		Musrenbang Kecamatan
	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Bidang Teknik Pendingin	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang teknik pendingin	20 Orang	106.100.000	APBD II		Teknokratik
	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Bidang Teknik Dasar Komputer	Non Penciri	BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang teknik Dasar Komputer	80 Orang	296.454.000	APBD II		Musrembang Kecamatan, Teknokratik
	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Menjahit Melalui MTU	Non Penciri	BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang menjahit	20 1 Kecamatan	78.543.000	APBD II		Musrembang Kecamatan

No	Program/Kegiatan	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan	Sumber Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Bidang Las Melalui MTU	Non Penciri	BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang las	40 2 Orang Kecamatan	209.132.000	APBD II		Musrembang Kecamatan
	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Bidang Otomotif Melalui MTU	Non Penciri	BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang otomotif melalui MTU	40 2 Orang Kecamatan	168.292.000	APBD II		Musrembang Kecamatan
	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Konstruksi Beton	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang konstruksi Beton	20 Orang	107.300.000	APBD II		Teknokratik
	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Perhotelan dan restaurant	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Perhotelan	20 Orang	108.889.000	APBD II		Musrembang Kecamatan
	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Permesinan Bubut	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Permesinan Bubut	60 Orang	308.830.000	APBD II		Teknokratik
	Sosialisasi Kurikulum Bagi Pengelola dan Instruktur Lembaga Latihan Swasta (LLS)	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah lembaga latihan swasta yang mengikuti sosialisasi	120 Orang / lembaga	99.867.000	APBD II		Teknokratik

No	Program/Kegiatan	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan	Sumber Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Bidang Sablon melalui MTU	Non Penciri	BLK	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang sablon	20 1 Orang Kecamatan	99.418.000	APBD II		Musrembang Kecamatan
	Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Bogor	Non Penciri	Kab. Bogor	Prosentase Produktivitas Tenaga Kerja di Kab. Bogor dalam 1 (satu) Tahun	1 Dokumen	129.100.000	APBD II		Teknokratik
	Pelatihan Peningkatan Produktifitas Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Wirausaha	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Produktivitas Kerja Bagi Tenaga dan Wirausaha	90 Orang	161.366.000	APBD II		Musrembang Kecamatan
	Pembangunan Sistem informasi Kebutuhan Pelatihan dan Pemagangan di Perusahaan	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah aplikasi sistem informasi yang dibangun	1 Aplikasi	127.347.000	APBD II		Teknokratik
	Sosialisasi Pemagangan Bagi Masyarakat di kabupaten Bogor	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pemagangan	200 Orang	65.890.000	APBD II		Teknokratik
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja					3.473.150.000			
	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah pencari kerja yang memperoleh informasi tentang penyerapan tenaga kerja di perusahaan	2400 Orang	851.182.000	APBD II		Teknokratik
	Pengelolaan Calon Tenaga Kerja Berdasarkan Pendaftar AK1	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah pencari kerja yang memperoleh informasi tentang penyerapan tenaga kerja diperusahaan	50 Orang	49.465.000	APBD II		Teknokratik

No	Program/Kegiatan	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan	Sumber Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Survalen ISO 9001:2015	Non Penciri	Kantor Disnaker	Tersedianya sertifikasi ISO untuk pelayanan AK I	1 Jenis Pelayanan	179.342.000	APBD II		Teknokratik
	Pembentukan Wirausaha Baru	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah tenaga kerja pengangguran dan setengah penganggur yang terserap	360 Orang 18 Kelompok	1.939.533.000	APBD II		Teknokratik, Reses
	Pelatihan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan perusahaan pengguna TKA, BKK dan LPTKS	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah perusahaan pengguna TKA, Pengelola LPTKS dan BKK yang terlatih	40 Orang 60 Perusahaan	186.416.000	APBD II		Teknokratik, Reses
	Sosialisasi Prosedur Informasi Pasar Kerja Melalui AKL, AKAD dan AKAN	Non Penciri	Kab. Bogor	Tersosialisasikannya informasi kesempatan kerja ke luar negeri kepada pencari kerja	150 Orang	91.891.000	APBD II		Teknokratik, Reses
	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan bagi Usaha Pemula dan Kelompok Usaha	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah Pelaku Usaha yang ingin berkembang	100 Orang	144.887.000	APBD II		Teknokratik, Reses
	Monitoring dan Evaluasi Perluasan Kerja	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi perluasan kerja	1 Dokumen	30.434.000	APBD II		Teknokratik
	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					1.255.673.000			
	Mediasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang terfasilitasi	160 Kasus	84.502.000	APBD II		Teknokratik
	Pengkajian dan Perumusan UMK/UMSK Kabupaten Bogor	Non Penciri	Kab. Bogor	Tercapainya kesepakatan Dewan Pengupahan dalam merekomendasikan besaran UMK/UMSK Kabupaten Bogor kepada Bupati	1 Dokumen	326.387.000	APBD II		Teknokratik

No	Program/Kegiatan	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan	Sumber Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Tripartit Daerah	Non Penciri	Kantor Disnaker	- Jumlah pelaksanaan sidang LKS Tripartit Daerah - Jumlah rekomendasi Kerja Sama Tripartit Daerah (saran, pertimbangan dan pendapat) yang tersusun	2 - kali sidang 2 - rekomendasi	127.622.000	APBD II		Teknokratik
	Pelaksanaan MayDay	Non Penciri	Kantor Disnaker	Kondusifnya iklim ketenagakerjaan melalui hubungan industrial yang dinamis, harmonis dan berkeadilan di perusahaan.	1 kegiatan may day	126.145.000	APBD II		Teknokratik
	Pembinaan dan Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan sosialisasi pembentukan LKS Bipartit	40 Perusahaan	84.663.000	APBD II		Teknokratik
	Pelatihan Mekanisme dan Sistem Pengupahan	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang struktur dan skala upah serta UMK/UMSK	50 Orang 25 Perusahaan	77.214.000	APBD II		Teknokratik
	Penanganan Kasus Pemogokan dan Kasus Ketenagakerjaan	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah kasus pemogokan yang difasilitasi penanganannya	20 Kasus	44.830.000	APBD II		Teknokratik
	Pelatihan Penyelesaian Perselisihan Secara Bipartit di Perusahaan (Permen No. 31 Tahun 2008)	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Penyelesaian Perselisihan secara Bipartit di Perusahaan	50 Orang	85.633.000	APBD II		Teknokratik
	Penilaian Pekerja Teladan dan Lembaga Ketenagakerjaan Terbaik	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah Pekerja Teladan Terpilih, PUK dan DPC Terbaik	3 Pekerja Teladan 3 PUK Terbaik 3 DPC Terbaik	59.204.000	APBD II		Teknokratik

No	Program/Kegiatan	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan	Sumber Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verifikasi dan Validasi Data SP/SB dan DPC	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah Data SP, SB , DPC dan Organisasi Pengusaha di Kabupaten Bogor	1 Dokumen	73.296.000	APBD II		Teknokratik
	Review Perencanaan Tenaga Kerja Makro	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah dokumen review perencanaan tenaga kerja makro	1 Dokumen	70.848.000	APBD II		Teknokratik
	Pembinaan dan Monitoring PP, PKB, dan PKWT	Non Penciri	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen PP, PKB dan PKWT yang dimonitoring	1 Dokumen	95.329.000	APBD II		Teknokratik
	Transmigrasi Regional					209.947.000			
	Penyuluhan Transmigrasi regional	Non Penciri	15 Kec	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan tentang transmigrasi regional	15 Kec	16.238.000	APBD II		Teknokratik
	Penempatan Transmigrasi Regional	Non Penciri	Gorontalo	Jumlah transmigran yang ditempatkan di lokasi penerima	10 KK	119.020.000	APBD II		Teknokratik
	Penjajagan calon lokasi penempatan transmigrasi dan pembuatan naskah kerja sama antar daerah	Non Penciri	Kalbar, Sulteng	Jumlah lokasi penempatan transmigrasi yang dilakukan penjajagan	2 Lokasi	2.362.000	APBD II		Teknokratik
	Monitoring dan Evaluasi perkembangan transmigrasi di lokasi penempatan	Non Penciri	Kalbar	Jumlah lokasi penempatan transmigrasi yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangannya	1 Lokasi	2.092.000	APBD II		Teknokratik
	Pelatihan Untuk Peserta Calon Transmigrasi	Non Penciri	Kalbar	Terbinanya dan terlatihnya calon transmigran yg siap diberangkatkan	20 orang	70.235.000	APBD II		Teknokratik
	JUMLAH					12.454.590.000			

1. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan Daerah, Nasional maupun Global. Perbandingan dilakukan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang timbul agar capaian kinerja sampai dengan 5 (lima) tahun dapat tercapai.

Pada prosesnya, penentuan rancangan awal RKPD didasarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya pada Renstra PD periode tahun 2013-2018, sedangkan hasil analisis kebutuhan merupakan kolaborasi dari rancangan awal dan proses-proses penyerapan usulan seperti Musrenbang Kecamatan, Forum OPD, Musrenbang Kabupaten dan Reses DPRD.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program realitas dengan mengantisipasi perkembangan/dinamika masa depan. Dengan pendekatan yang jelas dan sinergis, Instansi Pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Terdapat beberapa penambahan target kinerja kegiatan dan munculnya beberapa kegiatan baru hasil dari analisis kebutuhan dan usulan yang diberikan kepada Dinas Tenaga Kerja.

2.5. Penjelasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan yang bersumber dari masyarakat didapat dari Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah serta

Reses DPRD. Dengan adanya proses ini maka terhimpun program dan kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dinas serta indikator yang telah tertuang dalam RPJMD serta Renstra dinas tahun 2013-2018. Usulan yang masuk melalui Musrenbang Kecamatan, Forum PD dan Reses DPRD terkait pelatihan keterampilan bagi pencari kerja tersebar di seluruh kecamatan di Kab. Bogor, keterangan lebih detail dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Bogor

SKPD : DINAS TENAGA KERJA

No	Program/Kegiatan	Penciri Ter maju	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	Sumber Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Menjahit	Non Penciri	Kec Cileungsi, Leuwisadeng, Gunungputri, Parung, Kemang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang menjahit	12 Paket		Musrenbang Kecamatan
2	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Teknik Pendingin	Non Penciri	Kec. Cileungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Teknik Pendingin	1 Paket		Musrenbang Kecamatan
3	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Instalasi Listrik	Non Penciri	Kec. Gunungputri	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Instalasi Listrik	1 Paket		Musrenbang Kecamatan
4	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Las	Non Penciri	Kec. Gunungputri, Rancabungur	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Instalasi Las	2 Paket		Musrenbang Kecamatan
5	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Mobil Bensin	Non Penciri	Kec. Gunungputri, Rancabungur	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Mobil Bensin	2 Paket		Musrenbang Kecamatan
6	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Teknik Dasar Komputer	Non Penciri	Kec. Gunungputri, Kemang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang teknik dasar komputer	2 Paket		Musrenbang Kecamatan
7	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Otomotif	Non Penciri	Kec. Leuwisadeng, Kemang, Babakanmadang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang teknik dasar Otomotif	4 Paket		Musrenbang Kabupaten
8	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Tata Rias	Non Penciri	Kec. Leuwisadeng, Cileungsi, Babakanmadang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang tata rias	4 Paket		Musrenbang Kabupaten
9	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Perhotelan dan Restorant	Non Penciri	Kec. Cisarua	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Perhotelan dan Restorant	1 Paket		Musrenbang Kabupaten
10	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Perhotelan dan Restorant	Non Penciri	Kec. Cisarua, Babakanmadang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Perhotelan dan Restorant	2 Paket		Musrenbang Kabupaten
11	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Sablon	Non Penciri	Kec. Nanggung	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang sablon	1 Paket		Musrenbang Kabupaten
12	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Bordir	Non Penciri	Kec. Cileungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang bordir	1 Paket		Musrenbang Kabupaten
13	Pemagangan Bagi Pencari Kerja di Kab. Bogor	Non Penciri	Kec. Cisarua	Jumlah tenaga kerja yang dimagangkan	1 Paket		Musrenbang Kabupaten
14	Pelatihan Peningkatan Produktivitas Bagi Tenaga Kerja dan Wirausaha	Non Penciri	Kec. Parung Panjang, Gunungputri, Cisarua, Cariu, Babakanmadang	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Peningkatan Produktivitas Kerja Bagi Tenaga Kerja di Perusahaan dan Wirausaha	5 Paket		Musrenbang Kabupaten
15	Uji kompetensi Bagi Tenaga Kerja di Kabupaten Bogor	Non Penciri	Kec. Cileungsi, Cariu	Tersedianya Tenaga Kerja Kompeten yang memiliki Sertifikasi Profesi	4 Paket		Musrenbang Kabupaten
16	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Non Penciri	Kabupaten Bogor	Jumlah pencari kerja yang memperoleh informasi tentang penyerapan tenaga kerja di perusahaan	2 Paket		Reses Dewan
17	Pembentukan Wirausaha Baru	Non Penciri	Kabupaten Bogor	Jumlah tenaga kerja pengangguran dan setengah penganggur terserap	18 Paket		Reses Dewan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional dan Provinsi dijadikan pedoman dalam penyusunan RENJA Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor yang dipadukan dengan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 terutama keterpaduan dalam program kegiatan serta sasaran target yang akan dicapai. Identifikasi kebijakan nasional provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Bogor
Tahun 2019**

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Nasional		
1	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Nawa Cita	
2	Terciptanya sebanyak-banyaknya lapangan kerja formal	RPJPN (UU No. 17 Tahun 2007)	
3	Kesejahteraan pekerja informal meningkat	RPJPN (UU No. 17 Tahun 2007)	
4	Perlindungan dan jaminan pekerja yang layak	RPJPN (UU No. 17 Tahun 2007)	
5	Proses penyelesaian industrial memuaskan semua pihak	RPJPN (UU No. 17 Tahun 2007)	
6	Produktivitas yang tinggi agar dapat bersaing menghasilkan nilai tambah yang tinggi	RPJPN (UU No. 17 Tahun 2007)	
7	Pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program pelatihan yang strategis	RPJPN (UU No. 17 Tahun 2007)	
8	Pembekalan pengakuan kompetensi pekerja sesuai dinamika kebutuhan industri dan persaingan global	RPJPN (UU No. 17 Tahun 2007)	
9	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019	
10	Menciptakan 10 juta lapangan kerja baru	Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019	
11	Terciptanya perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor/sub sektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/sub sektor yang produktivitasnya tinggi	Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019	
B	Provinsi Jawa Barat		
1	Peningkatan daya saing tenaga kerja. Meningkatnya kualitas tenaga kerja Jawa Barat.	bappeda.jabarprov.go.id	
2	Perlindungan, pengawasan, dan memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat. Meningkatnya perlindungan, pengawasan, dan memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat.	bappeda.jabarprov.go.id	
3	Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja. 1. Mendukung Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus. 2. Membuka 2 (dua) juta lapangan kerja baru dan mencetak 100.000 wirausaha baru di Jawa Barat.	bappeda.jabarprov.go.id	
4	Kerja sama bidang ketrasmigrasian serta pengembangan kawasan transmigrasi 1. Meningkatkan pelayanan ketrasmigrasian 2. Meningkatkan kemandirian calon transmigran dan masyarakat translok (resettlement)	bappeda.jabarprov.go.id	

Berdasarkan tabel 3.1 tersebut diatas, salah satu kebijakan nasional di bidang ketenagakerjaan yang termasuk dalam nawa cita adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, hal ini sudah sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh provinsi Jawa Barat yaitu peningkatan daya saing tenaga kerja dan meningkatnya kualitas tenaga kerja jawa barat. Untuk itu Dinas Tenaga Kerja Kab. Bogor melakukan terobosan agar sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut yang diantaranya dengan cara menyelenggarakan program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang di dalamnya berisi kegiatan pelatihan keterampilan bagi para pencari kerja untuk beberapa kejuruan dengan tujuan agar pencari kerja memiliki keahlian atau skill yang dapat dijadikan sebagai modal dalam mendapatkan pekerjaan atau berwiraswasta serta program Peningkatan Kesempatan Kerja yang mengakomodir beberapa kegiatan seperti bursa kerja dan padat karya produktif.

Hal tersebut juga mendukung beberapa kebijakan nasional dan provinsi lainnya seperti menurunkan tingkat pengangguran terbuka, penciptaan 10 juta lapangan kerja baru, terciptanya perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor/sub sektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/sub sektor yang produktivitasnya tinggi.

Program lain yang dilaksanakan Tenaga Kerja guna mendukung kebijakan provinsi dalam hal perlindungan, pengawasan, dan memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat dan meningkatnya perlindungan, pengawasan, dan memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat adalah Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dimana pada program ini memfasilitasi pengawasan norma ketenagakerjaan, K3 dan BPJS di perusahaan, pelaksanaan bulan K3, mediasi perselisihan hubungan industrial, monitoring pelaksanaan UMK di perusahaan, pembinaan tripartit dan bipartit, dan juga pelatihan dan sertifikasi bagi operator alat angkat/angkut atau boiler di perusahaan.

Kebijakan lain untuk urusan transmigrasi adalah terkait dengan kerja sama bidang ketranmigrasian serta pengembangan kawasan transmigrasi, dalam hal ini Dinas, Tenaga Kerja Kab. Bogor akan melaksanakan Program

Transmigrasi Regional yang berisikan kegiatan penyuluhan transmigrasi, penjajagan lokasi transmigrasi, pelatihan bagi transmigran, penempatan transmigrasi dan monitoring perkembangan transmigran di lokasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu (1 sampai dengan 5 tahunan), dan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja dan kapasitas aparatur.
- b. Mengurangi tingkat pengangguran melalui pelatihan kerja yang berkarakter, perluasan kesempatan kerja serta transmigrasi yang produktif.
- c. Meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangan ketenagakerjaan.
- d. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.

2. Sasaran

Dengan tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan PD.
- c. Meningkatnya keterampilan pencari kerja dan produktivitas kerja.
- e. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja.
- f. Memperluas kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program transmigrasi.
- g. Meningkatnya penegakan peraturan ketenagakerjaan.
- h. Terpenuhinya hak dan kewajiban pekerja/pengusaha.

Cara mencapai Tujuan dan Sasaran

Cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh terpadu sebagai upaya organisasi dalam menetapkan kebijakan dan program untuk memperoleh hasil yang dapat ditetapkan dengan memperhatikan sumber daya yang ada dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan bantuan dan petunjuk bagi jajaran Dinas Tenaga Kerja untuk melaksanakan tupoksi yang berkaitan di bidang ketenagakerjaan. Adapun kebijakan-kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dapat ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana, prasarana dan sumber daya manusia di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
2. Meningkatkan tertib administrasi;
3. Meningkatkan keterampilan kerja dan usaha bagi pencari kerja;
4. Peningkatan sumber daya manusia dan pendapatan masyarakat;
5. Meningkatkan kerja sama antar daerah dalam rangka Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan transmigrasi;
6. Menurunkan angka kecelakaan kerja;
7. Meningkatkan pengawasan peraturan ketenagakerjaan; dan
8. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019 terdiri dari APBD II terdiri dari 9 program dan 78 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 12.454.590.000,-.

Jadi Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019 terdiri dari 9 program dan 78 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 12.454.590.000,-

Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019
KABUPATEN BOGOR

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 BIDANG URUSAN : TENAGA KERJA
 SKPD : DINAS TENAGA KERJA

KODE	Program dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah (Fokus)	Penciri Utama	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Pendanaan					Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Usulan						
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	Lain-Lain	Total Anggaran									
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
12 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																2.054.540.000		2.054.540.000	2.054.540.000					
12 01 01 01 0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	PD	Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12	Bulan	Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	4	Rekening	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	4	Rekening			240.000.000		240.000.000	240.000.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
12 01 01 01 0006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12	Bulan	1. Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/operasional al. 2. Jumlah Penggantian STNK Kendaraan Dinas/Operasional	26 9	Unit (Roda dua) Unit (Roda empat)	Terjaminnya legalitas masa penggunaan kendaraan dinas/operasional. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	26 9	Unit (Roda dua) Unit (Roda empat)			19.400.000		19.400.000	19.400.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	
12 01 01 01 0008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12	Bulan	- Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai - Jumlah alat kebersihan kantor yang dibutuhkan	11 17 3	Orang Jenis gedung	Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan gedung kantor. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	11 17 3	Orang Jenis gedung			246.050.000		246.050.000	246.050.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	
12 01 01 01 0010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12	Bulan	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	66 1 3 1	Jenis Sekretariat Bidang UPT	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan penyediaan alat tulis kantor. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	66 1 3 1	Jenis Sekretariat Bidang UPT			193.871.000		193.871.000	193.871.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	
12 01 01 01 0011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12	Bulan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	14 360.000	Jenis lembar	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan barang cetakan dan penggandaan. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	14 360.000	Jenis (cetakan) lembar (penggandaan) Sekretariat Bidang UPT			122.730.000		122.730.000	122.730.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	
12 01 01 01 0012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12	Bulan	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 1 3 1	Jenis	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	3 1 3 1	Jenis Sekretariat Bidang UPT			28.625.000		28.625.000	28.625.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	

KODE	Program dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah (Fokus)	Penciri Teraju	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Pendanaan					Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Usulan						
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II				Lain-Lain	Total Anggaran				
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
12.01.01.01.0016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	-	PD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12	Bulan	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	5 1 3 1	Jenis Sekretariat Bidang UPT	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan bahan logistik kantor Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	5 1 3 1	Jenis Sekretariat Bidang UPT	-	-	54.410.000	-	54.410.000	54.410.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
12.01.01.01.0017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12	Bulan	Jumlah orang yang diberikan jaman makanan dan minuman	1650	Orang	Terjadinya tamu kantor dan peserta rapat dengan baik. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	1650	Orang	-	-	58.050.000	-	58.050.000	58.050.000,00	Alternatif	Teknokratik	
12.01.01.01.0018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12	Bulan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	350 224	Perjalanan (DD) Perjalanan (LD)	Terwujudnya kelancaran koordinasi dengan instansi terkait. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	350 224	Perjalanan (DD) Perjalanan (LD)	-	-	577.895.000	-	577.895.000	577.895.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	
12.01.01.01.0019	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Penguatan Manajemen dan Kualitas Administrasi Perangkat Daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12	Bulan	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	1	Orang	Terwujudnya dukungan kelancaran pelaksanaan tugas aparatur. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	1	Orang	-	-	50.108.000	-	50.108.000	50.108.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	
12.01.01.01.0020	Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12	Bulan	Jumlah dokumen arsip pengelolaan administrasi dokumentasi dan arsip	2	Jenis	Terwujudnya tertib administrasi dokumentasi dan arsip SKPD. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	2	Jenis	-	-	14.943.000	-	14.943.000	14.943.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	
12.01.01.01.0021	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12	Bulan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	16	Dokumen	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	16	Dokumen	-	-	189.820.000	-	189.820.000	189.820.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	
12.01.01.01.0022	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	Jumlah dokumen administrasi barang	4	Dokumen	Terwujudnya tertib administrasi barang yang diinventarisir. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	4	Dokumen	-	-	6.938.000	-	6.938.000	6.938.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	
12.01.01.01.0024	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	Jumlah petugas keamanan kantor	10 3	Orang Gedung	Terwujudnya keamanan di lingkungan gedung kantor. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	10 3	Orang Gedung	-	-	251.700.000	-	251.700.000	251.700.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	

KODE	Program dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah (Fokus)	Penciri Teraju	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Pendanaan					Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Usulan							
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			APBN	APBD I				APBD II	Lain-Lain	Total Anggaran				
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
12	01 01 02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														771.050.000		771.050.000	771.050.000						
12	01 01 02 0021		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terpenuhiya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12	Bulan	Jumlah gedung kantor dinas, UPT BLK, dan Transito yang terpelihara	3	Gedung	Terpeliharanya umur ekonomis bangunan gedung kantor. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	3	Gedung			197.775.000		197.775.000	197.775.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
12	01 01 02 0023		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terpenuhiya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12	Bulan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	23	Unit	Terpeliharanya umur teknis kendaraan dinas/operasional. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1	23	Unit			122.650.000		122.650.000	122.650.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
12	01 01 02 0025		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terpenuhiya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12	Bulan	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	342	Jenis Unit	Terpeliharanya umur teknis peralatan gedung kantor. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	342	Jenis Unit			44.525.000		44.525.000	44.525.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
12	01 01 02 0027		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terpenuhiya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12	Bulan	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	3116	Jenis Unit	Terpeliharanya umur teknis peralatan gedung kantor. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	3116	Jenis unit			79.750.000		79.750.000	79.750.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
12	01 01 02 0031		Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terpenuhiya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12	Bulan	Jumlah taman halaman kantor yang terpelihara	2	Lokasi	Terpeliharanya umur ekonomis taman halaman kantor. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	2	Lokasi			199.325.000		199.325.000	199.325.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
12	01 01 02 0033		Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komunikasi	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terpenuhiya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12	Bulan	Jumlah jaringan listrik dan komunikasi yang terpelihara	2	Jaringan	Terpeliharanya umur teknis jaringan listrik dan komunikasi. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	2	Jaringan			66.150.000		66.150.000	66.150.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
12	01 01 02 0038		Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terpenuhiya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12	Bulan	Jumlah jaringan komputerisasi yang terpelihara	1	Jaringan	Terpeliharanya umur teknis jaringan komputer. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	1	Jaringan			60.875.000		60.875.000	60.875.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
12	01 01 04		Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur																	46.250.000		46.250.000	46.250.000			
12	01 01 04 0005		Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur	1	Dinas	Jumlah bimbingan mental jasmani dan rohani	33	kali	Terwujudnya kesehatan mental dan rohani bagi seluruh aparatur dinas. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	33	kali			46.250.000		46.250.000	46.250.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik

KODE	Program dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah (Fokus)	Penciri Utama	Lokasi	Indikator Kinerja												APBN	APBD I	Kebutuhan Pendanaan			Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Usulan											
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			APBD II	Lain-Lain	Total Anggaran																			
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																	
12	01	01	05															657.818.000		657.818.000		657.818.000														
12	01	01	05	0001	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	12	Bulan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan kantor	4	Dokumen	40	Dokumen	4	Dokumen	40	Dokumen			16.407.000		16.407.000	16.407.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
12	01	01	05	0002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	12	Bulan	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen			4.466.000		4.466.000	4.466.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik		
12	01	01	05	0004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	12	Bulan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen			5.736.000		5.736.000	5.736.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik		
12	01	01	05	0005	Penyusunan perencanaan anggaran	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	12	Bulan	Jumlah dan jenis dokumen perencanaan anggaran	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen			107.205.000		107.205.000	107.205.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik		
12	01	01	05	0006	Penatausahaan Keuangan SKPD	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	12	Bulan	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen			121.540.000		121.540.000	121.540.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik		
12	01	01	05	0010	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	12	Bulan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen			162.824.000		162.824.000	162.824.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik		
12	01	01	05	0013	Publikasi kinerja SKPD	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	12	Bulan	Jumlah dokumen informasi kegiatan SKPD kepada masyarakat	16	Media	16	Media	16	Media			100.000.000		100.000.000	100.000.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik		

KODE	Program dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah (Fokus)	Penciri Teraju	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Pendanaan					Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Usulan						
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			APBN	APBD I				APBD II	Lain-Lain	Total Anggaran			
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
12 01 01 05 0014	Penyusunan Renja SKPD	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan terbit administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	PD	Terwujudnya Pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD	12	Bulan	Jumlah dokumen Renja SKPD	2	Dokumen	Tersedianya dokumen Renja SKPD. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	2	Dokumen	-	-	9.934.000	-	9.934.000	9.934.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
12 01 01 05 0014	Penyusunan Renstra SKPD	Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi	Peningkatan kinerja manajemen dan terbit administrasi perangkat daerah	NON PENCIRI	PD	PD	PD	PD	Terwujudnya Pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD	12	Bulan	Jumlah dokumen Renstra SKPD	1	Dokumen	Tersedianya dokumen Renstra SKPD. Mendukung prioritas pembangunan ke-3 dan fokus pembangunan ke-1.	1	Dokumen	-	-	129.706.000	-	129.706.000	129.706.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
05 01 01 22	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja																-	-	1.032.783.000	-	1.032.783.000	6.939.541.000			
05 01 01 22 0010	Uji Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Di Kabupaten Bogor	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	PD	PD	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1160	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi.	280	Orang	Bertambahnya Tenaga Kerja Kompeten. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	280	Orang	-	-	1.032.783.000	-	1.032.783.000	1.032.783.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
05 01 01 22	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja																-	-	2.953.379.000	-	2.953.379.000	2.953.379.000			
05 01 01 22 0010	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Bidang Montir Motor	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	-	Balai Latihan Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1160	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang montir motor	20	Orang	Meningkatnya keterampilan para pencari kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	20	Orang	-	-	90.313.000	-	90.313.000	90.313.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
05 01 01 22 0012	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Bidang Las	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	TAJUR HALANG	TONJONG	-	Balai Latihan Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1160	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang las	20	Orang	Peserta dapat mengimplementasikan materi pelatihan sesuai dengan bidang kejuruan yang diikutinya. Mendukung Prioritas Pembangunan ke 5 dan Fokus Pembangunan ke 5.	20	Orang	-	-	103.894.000	-	103.894.000	103.894.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
05 01 01 22 0014	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Bidang Mobil Bensin	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	-	Balai Latihan Kerja	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1160	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Mobil Bensin	20	Orang	Peserta dapat mengimplementasikan materi pelatihan sesuai dengan bidang kejuruan yang diikutinya. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	20	Orang	-	-	99.080.000	-	99.080.000	99.080.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
05 01 01 22 0019	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Bidang Teknik Pendingin	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	TAJUR HALANG	TONJONG	-	Balai Latihan Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1160	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang teknik pendingin	20	Orang	Peserta dapat mengimplementasikan materi pelatihan sesuai dengan bidang kejuruan yang diikutinya. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	20	Orang	-	-	106.100.000	-	106.100.000	106.100.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik

KODE	Program dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah (Fokus)	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Pendanaan					Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Usulan										
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II				Lain-Lain	Total Anggaran								
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target									Satuan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
05	01	01	22	0020	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Bidang Teknik Dasar Komputer	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	TAJUR HALANG	TONJONG	-	Balai Latihan Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1160	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang teknik Dasar Komputer	80	Orang	Peserta dapat mengimplementasikan materi pelatihan sesuai dengan bidang kejuruan yang diikutinya. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	80	Orang	-	-	296.454.000	-	296.454.000	296.454.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik, Reses
05	01	01	22	0048	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Permesinan Bubut	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	-	UPT- BLK Tajur Halang	Meningkatnya Kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1160	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Permesinan Bubut	60	Orang	Peserta dapat mengimplementasikan materi pelatihan sesuai dengan bidang kejuruan yang diikutinya. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	60	Orang	-	-	308.830.000	-	308.830.000	308.830.000,00	Baru	Teknokratik
05	01	01	22	0033	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Konstruksi Beton	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	Babakan Madang	-	-	Babakan Madang	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1160	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang konstruksi Beton	20	Orang	Peserta dapat mengimplementasikan materi pelatihan sesuai dengan bidang kejuruan yang diikutinya. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	20	Orang	-	-	107.300.000	-	107.300.000	107.300.000,00	Baru	Teknokratik
05	01	01	22	0047	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Perhotelan dan restaurant	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	PD	UPT- BLK Tajur Halang	Meningkatnya Kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1160	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Perhotelan	20	Orang	Peserta dapat mengimplementasikan materi pelatihan sesuai dengan bidang kejuruan yang diikutinya. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	20	Orang	-	-	108.889.000	-	108.889.000	108.889.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
05	01	01	22	0030	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Bidang Las Melalui MTU	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	Rancabangun, Gunung Putri	-	-	2 Kecamatan	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1160	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dibidang las	40	Orang Kecamatan	Peserta dapat mengimplementasikan materi pelatihan sesuai dengan bidang kejuruan yang diikutinya. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	40	Orang Kecamatan	-	-	209.132.000	-	209.132.000	209.132.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
05	01	01	22	0031	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Bidang Otomotif Melalui MTU	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	Leuwisadeng, Babakanmadang	-	-	2 Kecamatan	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1160	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang otomotif melalui MTU	40	Orang Kecamatan	Peserta dapat mengimplementasikan materi pelatihan sesuai dengan bidang kejuruan yang diikutinya. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	40	Orang Kecamatan	-	-	168.292.000	-	168.292.000	168.292.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
05	01	01	22	0031	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Bidang Teknik Pendingin Melalui MTU	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	Cileungsi	-	-	1 Kecamatan	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1160	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang teknik pendingin melalui MTU	20	Orang Kecamatan	Peserta dapat mengimplementasikan materi pelatihan sesuai dengan bidang kejuruan yang diikutinya. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	20	Orang Kecamatan	-	-	86.716.000	-	86.716.000	86.716.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik

KODE	Program dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah (Fokus)	Penciri Terjaya	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Pendanaan					Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Usulan										
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			APBN	APBD I				APBD II	Lain-Lain	Total Anggaran							
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
05	01	01	22	0031	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Bidang Instalasi Listrik Melalui MTU	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	Cileungsi			1 Kecamatan	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1160	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang instalasi listrik melalui MTU	20	Orang Kecamatan	Peserta dapat mengimplementasikan materi pelatihan sesuai dengan bidang kejuruan yang diikutinya. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	20	Orang Kecamatan	-	-	74.696.000	-	74.696.000	74.696.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
05	01	01	22	0031	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Bidang Menjahit Melalui MTU	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	Cileungsi			1 Kecamatan	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1160	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang menjahit melalui MTU	20	Orang Kecamatan	Peserta dapat mengimplementasikan materi pelatihan sesuai dengan bidang kejuruan yang diikutinya. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	20	Orang Kecamatan	-	-	78.543.000	-	78.543.000	78.543.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
05	01	01	22	0031	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Bidang Menjahit	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	Cileungsi			1 Kecamatan	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1160	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang menjahit	20	Orang	Peserta dapat mengimplementasikan materi pelatihan sesuai dengan bidang kejuruan yang diikutinya. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	20	Orang	-	-	92.962.000	-	92.962.000	92.962.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
05	01	01	22	0031	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Bidang Sablon	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	Cileungsi			1 Kecamatan	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1160	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang sablon	20	Orang	Peserta dapat mengimplementasikan materi pelatihan sesuai dengan bidang kejuruan yang diikutinya. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	20	Orang	-	-	99.418.000	-	99.418.000	99.418.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
05	01	01	22	0054	Pelatihan Pengukuran Produktivitas Kerja di Perusahaan	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	Kab. Bogor	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1160	Orang	Jumlah perusahaan yang mengikuti Pelatihan	30	Perusahaan	Terukurnya kinerja tenaga kerja di perusahaan. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	30	Perusahaan	-	-	56.237.000	-	56.237.000	56.237.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	
05	01	01	22	0054	Pengukuran Produktivitas Kerja di Kabupaten Bogor	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	Kab. Bogor	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1160	Orang	Persentase Produktivitas Tenaga Kerja di Kab. Bogor dalam 1 (satu) Tahun	1	Dokumen	Terukurnya Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Bogor untuk bahan Perencanaan Ketenaga Kerjaan Tahun berikutnya. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	1	Dokumen	-	-	129.100.000	-	129.100.000	129.100.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	
05	01	01	22	0056	Bulan Produktivitas Perusahaan di Kab. Bogor	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	Kab. Bogor	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1160	Orang	Jumlah Perusahaan yang mengikuti seleksi administrasi Produktivitas Kerja Jumlah Perusahaan yang terpilih sebagai Perusahaan terbaik dalam	40	Perusahaan	Penyebaran produktivitas kerja yang efisien dan efektif. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	40	Perusahaan	-	-	104.927.000	-	104.927.000	104.927.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	

KODE	Program dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah (Fokus)	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Pendanaan					Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Usulan																		
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II				Lain-Lain	Total Anggaran																
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target									Satuan															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																		
05	01	01	22	0049	Pelatihan Peningkatan Produktivitas Kerja Bagi Tenaga Kerja dan wirausaha	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	Kab. Bogor	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1160	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan Produktivitas Kerja Bagi Tenaga Kerja dan wirausaha	90	Orang	Tersedianya Tenaga Kerja Yang Produktif dan Kompeten. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	90	Orang	-	-	161.366.000	-	161.366.000	161.366.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik									
05	01	01	22	0049	Pembangunan Sistem informasi Kebutuhan Pelatihan dan Pemagangan di Perusahaan	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	Kab. Bogor	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1160	Orang	Jumlah aplikasi sistem informasi yang dibangun	1	Aplikasi	Tersedianya Sistem informasi tentang kebutuhan pelatihan dan pemagangan di perusahaan. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	1	Aplikasi	-	-	127.347.000	-	127.347.000	127.347.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik									
05	01	01	22	0049	Sosialisasi Pemagangan Bagi Masyarakat di kabupaten Bogor	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	Kab. Bogor	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1160	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pemagangan	200	Orang	Tersampainya informasi tentang pemagangan. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	200	Orang	-	-	65.890.000	-	65.890.000	65.890.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik									
05	01	01	22	0051	Sosialisasi Kurikulum Bagi Pengelola dan Instruktur Lembaga Latihan Swasta (LLS)	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	Kab. Bogor	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1160	Orang	Jumlah peserta sosialisasi kurikulum bagi pengelola dan instruktur LLS	120	Orang	Peserta dapat mengimplementasikan materi pelatihan sesuai dengan bidang kejuruan yang dikujutnya. Mendukung Prioritas Pembangunan ke 5, dan Fokus Pembangunan ke 5.	120	Orang	-	-	99.867.000	-	99.867.000	99.867.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik									
05	01	01	22	0062	Pemagangan Bagi Pencari Kerja di Kab. Bogor	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	Kab. Bogor	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1160	Orang	Jumlah tenaga kerja yang dimagangkan	60	Orang	Menciptakan peluang bagi pencari kerja untuk melaksanakan pemagangan di dalam dan luar negeri. Mendukung Prioritas Pembangunan ke 5 dan Fokus Pembangunan Ke 5.	60	Orang	-	-	178.026.000	-	178.026.000	178.026.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik									
05	01	01	23		Program Peningkatan Kesempatan Kerja																																
05	01	01	23	0001	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (Bursa Tenaga Kerja)	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	Kabupaten Bogor	Meningkatnya Penyerapan Pengangguran dan Setengah Penganggur	1439	Orang	Jumlah pencari kerja yang memperoleh informasi tentang penyerapan tenaga kerja di perusahaan	400	Orang	Tersampainya informasi Bursa kerja kepada Pencari kerja dan terfasilitasinya penempatan tenaga kerja di perusahaan. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	400	Orang	-	-	851.182.000	-	851.182.000	851.182.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik									
05	01	01	23	0001	Pengelolaan Calon Tenaga Kerja berdasarkan Pendaftaran AK1	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	Kabupaten Bogor	Meningkatnya Penyerapan Pengangguran dan Setengah Penganggur	1439	Orang	Jumlah pencari kerja yang memperoleh informasi tentang penyerapan tenaga kerja di perusahaan	50	Orang	Tercapainya penyerapan Penganggur dan setengah Penganggur (Pencari Kerja) yang terdaftar untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	50	Orang	-	-	49.465.000	-	49.465.000	49.465.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik									

KODE	Program dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah (Fokus)	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Pendanaan					Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Usulan												
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II				Lain-Lain	Total Anggaran										
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target									Satuan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
05	01	01	23	0032	Pembentukan Wirausaha Baru	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	Kec. Parung Panjang, Cigudeg, Jasinga, Rumpin, Sukajaya, Leuwisadeng, Leuwiliang, Nanggung, Tenjo, Klapanunggal, Citeureup, Jonggol, Gunungputri, Caringin, Dramaga, Ciseeng, Ciawi, Pamijahan	PD	PD	PD	Rancabungur, Tenjo, Tenjo, Tenjo	Meningkatnya Penyerapan Pengangguran dan Setengah Penganggur	1439	200	Orang Perusahaan	Jumlah tenaga kerja pengangguran dan setengah penganggur yang terserap	360	Orang	Terbukanya wirausaha baru bagi tenaga kerja pengangguran dan setengah penganggur. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	360	Orang	-	-	1.939.533.000	-	1.939.533.000	1.939.533.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik, Reses
05	01	01	23	0030	Monitoring dan Evaluasi Perluasan Kerja	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	PD	PD	Meningkatnya Penyerapan Pengangguran dan Setengah Penganggur	1439	200	Orang Perusahaan	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi perluasan kerja	1	Dokumen	Pelaku usaha dapat meningkatkan manajemen usaha. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	1	Dokumen	-	-	30.434.000	-	30.434.000	30.434.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	
05	01	01	23	0030	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan bagi Usaha Pemula dan Kelompok Usaha	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	PD	PD	Meningkatnya Penyerapan Pengangguran dan Setengah Penganggur	1439	200	Orang Perusahaan	Jumlah Pelaku Usaha yang ingin berkembang	100	Orang	Pelaku usaha dapat meningkatkan manajemen usaha. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	100	Orang	-	-	144.887.000	-	144.887.000	144.887.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	
05	01	01	23	0031	Pelatihan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perusahaan Pengguna TKA, BKK dan LPTKS	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Kabupaten Bogor	Tersedianya pengelola LPTKS dan BKK yang profesional	1439	200	Orang Perusahaan	Jumlah perusahaan pengguna TKA, Pengelola LPTKS dan BKK yang terlatih	90	Orang	Perusahaan pengguna TKA, Pengelola LPTKS dan BKK mampu mengaplikasikan hasil pelatihan pada lembaga/perusahaan tempat mereka bernaung. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	90	Orang	-	-	186.416.000	-	186.416.000	186.416.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	
05	01	01	23	0030	Survalen ISO 9001:2015	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	PD	PD	Meningkatnya Penyerapan Pengangguran dan Setengah Penganggur	12	Bulan	Tersedianya sertifikasi ISO untuk pelayanan AK I	1	Jenis Pelayanan	Tersertifikasinya pelayanan AK I kepada masyarakat. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	1	1	Sertifikat ISO 9001:2008	-	-	179.342.000	-	179.342.000	179.342.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	
05	01	01	23	0031	Sosialisasi Prosedur Informasi Pasar Kerja Melalui AKL, AKAD dan AKAN	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Kabupaten Bogor	Meningkatnya Penyerapan Pengangguran dan Setengah Penganggur	1439	200	Orang Perusahaan	Tersosialisasi nya informasi kesempatan kerja ke luar negeri kepada pencari kerja	150	Orang	Meningkatnya peluang pencari kerja untuk bekerja ke luar negeri dan Meningkatkan pemahaman pencari kerja terhadap peraturan yang berlaku tentang Perlindungan dan Penerimaan TKI ke Luar Negeri. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	150	Orang	-	-	91.891.000	-	91.891.000	91.891.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	

KODE	Program dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah (Fokus)	Penciri Teraju	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Pendanaan					Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Usulan						
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			APBN	APBD I				APBD II	Lain-Lain	Total Anggaran			
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
05 01 01 24	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan																1.255.673.000		1.255.673.000	1.255.673.000					
05 01 01 24 0002	Mediasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	PD	PD	Terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha di Perusahaan	1630	Perusahaan	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang terfasilitasi	160	Kasus	Tersedianya Anjuran/kesepakatan kepada pihak Perusahaan dan pihak pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	160	anjuran/Kesepakatan			84.502.000		84.502.000	84.502.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
05 01 01 24 0022	Penanganan Kasus Pemogokan dan Kasus Ketenagakerjaan	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	-	Perusahaan yang Mengalami Pemogokan	Terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha di Perusahaan	1630	Perusahaan	Jumlah kasus pemogokan yang difasilitasi penanganannya	20	Kasus	Terfasilitasinya penanganan pemogokan dan kasus ketenagakerjaan di perusahaan. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	20	Kasus			44.830.000		44.830.000	44.830.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	
05 01 01 24 0012	Pelaksanaan Kerjasama Tripartit Daerah	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha di Perusahaan	1630	Perusahaan	- Jumlah pelaksanaan sidang LKS Tripartit Daerah - Jumlah rekomendasi Kerja Sama Tripartit Daerah (saran, pertimbangan dan pendapat) yang tersusun	222	- kali sidang rekomendasi	Konsusifnya ikdim ketenagakerjaan melalui hubungan industrial yang dinamis, harmonis dan berkesdilan di perusahaan. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	222	- kali sidang rekomendasi			127.622.000		127.622.000	127.622.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	
05 01 01 24 0013	Pembinaan dan Pembentukan lembaga kerjasama (LKS) Bipartit	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	-	Beberapa Perusahaan di Kabupaten Bogor	Terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha di Perusahaan	1630	Perusahaan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pembentukan LKS Bipartit	40	Perusahaan	Pekerja dan Pengusaha mampu mengaplikasikan pembentukan dan Pembinaan LKS Bipartit. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	40	Perusahaan			84.663.000		84.663.000	84.663.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	
05 01 01 24 0030	Bimtek Penyelesaian Perselisihan Secara Bipartit di Perusahaan (Permen No. 31 Tahun 2008)	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha di Perusahaan	12	Bulan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Penyelesaian Perselisihan secara Bipartit di Perusahaan	50	Orang	Pengusaha dan pekerja mampu mengaplikasikan hasil bimtek untuk melaksanakan kegiatan bipartit di perusahaannya. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	50	Orang			85.633.000		85.633.000	85.633.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	
05 01 01 24 0009	Pengkajian dan Perumusan UMK/UMSK Kabupaten Bogor	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	PD	Terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha di Perusahaan	1.630	Perusahaan	Tercapainya kesepakatan Dewan Pengupahan dalam merekomendasikan besaran UMK/UMSK Kabupaten Bogor kepada Bupati	1	Dokumen	Tersedianya rekomendasi besaran UMK/UMSK Kabupaten Bogor kepada Bupati untuk di ajukan penetapannya oleh Gubernur Jawa Barat. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	1	Dokumen			326.387.000		326.387.000	326.387.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik	

KODE	Program dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah (Fokus)	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Pendanaan					Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Usulan																
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II				Lain-Lain	Total Anggaran														
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																
05	01	01	24	0014	Pelatihan Mekanisme dan sistem pengupahan	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	PD	PD	Terciptanya ketenangan bekerja berusaha di Perusahaan	1630	Perusahaan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Mekanisme dan Sistem Pengupahan di Kabupaten Bogor	50	Orang	Terwujudnya Pemahaman dan Mengerti Mekanisme dan Sistem Pengupahan tentang Skala UMK/UMSK Kabupaten Boogor. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	50	Orang	-	-	77.214.000	-	77.214.000	77.214.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik						
05	01	01	24	0067	Penilaian Pekerja Teladan dan Lembaga Ketenagakerjaan Terbaik	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	PD	PD	Terciptanya ketenangan bekerja dan Berusaha di Perusahaan	1630	Perusahaan	Jumlah Pekerja Teladan dan LKS terbaik	3	Pekerja Teladan LKS Terbaik	Terpilihnya Pekerja Teladan, dan LKS terbaik Tingkat Kabupaten Bogor. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	3	Pekerja Teladan LKS Terbaik	-	-	59.204.000	-	59.204.000	59.204.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik						
05	01	01	24	0070	Verifikasi dan Validasi Data SP/SB dan DPC	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	-	Perusahaan di Wilayah Bogor	Terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha di Perusahaan	1630	Perusahaan	Jumlah dokumen verifikasi data SP/SB dan DPC di Kabupaten Bogor	1	Dokumen	Tervalidasinya data SP/SB dan DPC di Kabupaten Bogor. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	1	Dokumen	-	-	73.296.000	-	73.296.000	73.296.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik						
05	01	01	24	0070	Pembinaan dan Monitoring PP, PKB, dan PKWT	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	-	Perusahaan di Wilayah Bogor	Terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha di Perusahaan	1630	Perusahaan	Jumlah Dokumen PP, PKB dan PKWT yang dimonitoring	1	Dokumen	Terverifikasinya PP, PKB dan PKWT yang masih aktif. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	1	Dokumen	-	-	95.329.000	-	95.329.000	95.329.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik						
05	01	01	24	0070	Pelaksanaan MayDay	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	-	Perusahaan di Wilayah Bogor	Terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha di Perusahaan	1630	Perusahaan	Pelaksanaan Hari Buruh Nasional	1	Kegiatan	Kondusifnya iklim ketenagakerjaan melalui hubungan industrial yang dinamis, harmonis dan berkeadilan di perusahaan. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	1	Kegiatan	-	-	126.145.000	-	126.145.000	126.145.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik						
05	01	01	24	0026	Review Perencanaan Tenaga Kerja Makro	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD	PD	-	Perusahaan di Kabupaten Bogor	Terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha di perusahaan	1630	Perusahaan	Jumlah dokumen review perencanaan tenaga kerja makro	1	Dokumen	Terlaksananya kegiatan sesuai dengan perencanaan tenaga kerja makro. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	1	Dokumen	-	-	70.848.000	-	70.848.000	70.848.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik						
05	01	01	25		Program Transmigrasi Regional																														
				25	0003	Penyuluhan Transmigrasi Regional	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	15	Kecamatan		Tersaharkannya keluarga transmigran ke lokasi transmigrasi guna peningkatan kondisi ekonomi	15	Kecamatan	Jumlah lokasi yang diberikan penyuluhan transmigrasi regional	15	Kecamatan	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang transmigrasi. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	15	Kecamatan	-	-	16.238.000	-	16.238.000	16.238.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik						

KODE	Program dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah (Fokus)	Penciri Termaju	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Pendanaan					Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Sumber Usulan						
						Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			APBN	APBD I				APBD II	Lain-Lain	Total Anggaran			
						Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	25 0003	Penempatan Transmigrasi Regional	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	Gorontalo, Sulteng		Gorontalo, Sulteng	Tersalurkannya keluarga transmigran ke lokasi transmigrasi guna peningkatan kondisi ekonomi	10	KK	Jumlah transmigran yang ditempatkan di lokasi penerima	10	KK	Terwujudnya peningkatan peluang kerja dan kondisi ekonomi bagi transmigran di daerah penempatan transmigrasi. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	10	KK	-	-	119.020.000	-	119.020.000	119.020.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
	25 0004	Penjajagan calon lokasi penempatan transmigrasi dan pembuatan naskah kerja sama antar daerah	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	Kalbar, Sultra		Kalbar, Sultra	Tersalurkannya keluarga transmigran ke lokasi transmigrasi guna peningkatan kondisi ekonomi	2	Lokasi	Jumlah lokasi penempatan transmigrasi yang dilakukan penjajagan	2	Lokasi	Tersedianya lokasi penerima dan naskah kerjasama antar daerah pengirim dan penerima transmigran. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	2	Lokasi	-	-	2.362.000	-	2.362.000	2.362.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
	25 0005	Monitoring dan Evaluasi perkembangan transmigrasi di lokasi penempatan	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	Gorontalo		Gorontalo	Tersalurkannya keluarga transmigran ke lokasi transmigrasi guna peningkatan kondisi ekonomi	1	Lokasi	Jumlah lokasi penempatan transmigrasi yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangannya	1	Lokasi	Tersedianya bahan evaluasi untuk perencanaan program transmigrasi yang akan datang. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	1	Lokasi	-	-	2.092.000	-	2.092.000	2.092.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
	25 0005	Pelatihan Untuk Peserta Calon Transmigrasi	Meningkatkan daya saing perekonomian	Peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja	NON PENCIRI	PD		PD	Tersalurkannya keluarga transmigran ke lokasi transmigrasi guna peningkatan kondisi ekonomi	10	Orang	Terbinanya dan terlatihnya calon transmigran yg siap diberangkatkan	20	Orang	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan usaha bagi calon transmigran. Mendukung prioritas pembangunan ke-5 dan fokus pembangunan ke-5.	20	Orang	-	-	70.235.000	-	70.235.000	70.235.000,00	Sedang Berjalan	Teknokratik
		JUMLAH																-	-	12.454.590.000	-	12.454.590.000	12.454.590.000		

BAB IV

PENUTUP

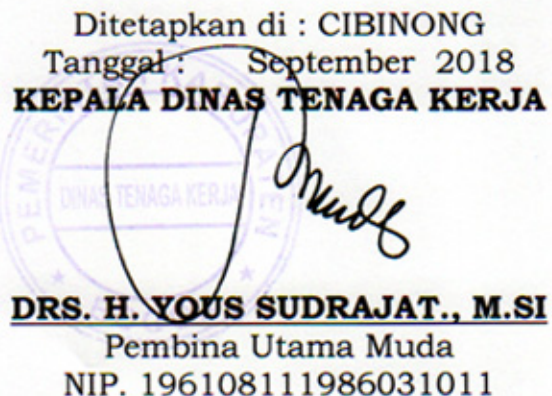
Renja Dinas Tenaga Kerja tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 di lingkup Dinas Tenaga Kerja, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2018 sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.

Dalam rangka mencapai target sebagai kabupaten termaju di Indonesia, isi dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja tahun 2019 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Tenaga Kerja, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2019 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Tenaga Kerja.

Semoga Renja Dinas Tenaga Kerja tahun 2019 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2019. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di : CIBINONG
Tanggal : September 2018
KEPALA DINAS TENAGA KERJA



DRS. H. YOUS SUDRAJAT., M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 196108111986031011

BAB IV P E N U T U P

Demikian Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019 ini disusun sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019 serta pedoman pelaksanaannya di tahun 2019. Semoga substansi yang telah disusun dapat menggambarkan upaya pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dalam mendukung tercapainya target kinerja Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019 ini diharapkan dapat dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan seluruh tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2019 dapat dicapai.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

BUPATI BOGOR,



NURHAYANTI